

**EVALUASI KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KELURAHAN**
(Studi Pada Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BALQIS DEMES PISCESA
NIM. 0810310185**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2012

Syukur alhamdulillah terucap untuk Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang tak terkira. Allah SWT yang membuatku hidup, yang membuatku untuk belajar berjuang dalam kehidupan, dan membuatku percaya bahwa keajaiban itu ada.

Kedua orang tuaku... Bapak "Pak Ish" dan Ibu "Bu Sri" yang selalu memberikan dukungan, doa, dan yang selalu menjadi inspirasiku dalam segala hal. Terimakasih untuk tidak pernah merasa bosan mengingatkan dan terimakasih telah membuatku lebih dapat bersabar dan menghargai hal apapun. ☺

Kedua adikku tersayang... Dek Bella "SiNdut" dan Dek Wiwi yang gak pernah bisa diem dan selalu rame. Terimakasih untuk doa, kebahagiaan, dan kegembiraan yang selalu ada disaat aku gak bisa ketawa. ☺

Keluarga besarku... Keluarga Yangti dan Keluarga Mbah, serta sodara-sodaraku yang gak bisa disebutkan satu-satu. Terimakasih untuk doa dan support yang tak terkira.

Temen-temen seperjuangan... Anak "E" Angkatan 2008. Terimakasih atas kebersamaan selama 4 tahun yang sangat berkesan.

Teman terbaikku... Tika dan Ari yang selalu ngasih semangat, doa, keceriaan, dan dukungan. Terimakasih atas waktu-waktu dan kebersamaan selama ini, semoga silaturahmi ini gak pernah terputus.

Dan untuk seorang semangat, kekuatan, dan inspirasi dalam hidup... Dithok Syahfril Syahrani yang selalu mendampingi. Terimakasih untuk doa, semangat, kekuatan, dan dukungan yang selama ini aku dapatkan. Terimakasih untuk selalu mengajarkan bagaimana menerima suka dan duka dengan ikhlas. ☺

" Jalanilah apapun dengan sebuah keyakinan, karena keyakinan akan mengantarkan kita menuju jalan yang kita inginkan. Sedangkan Ibadah, Doa, dan Amal akan memberikan kita kemudahan mendapatkan apa yang kita inginkan "

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

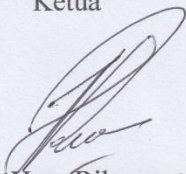
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Juli 2012
Jam : 08.00 wib
Skripsi atas nama : Balqis Demes Piscesa
Judul : Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
(Studi Pada Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang)

Dan Dinyatakan Lulus

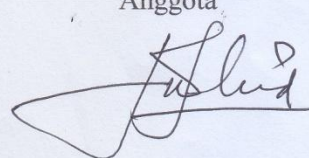
MAJELIS PENGUJI

Ketua



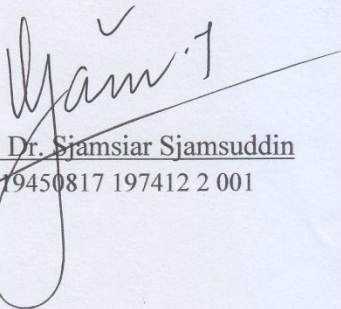
Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



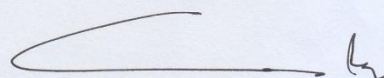
Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561204 198703 1 008

Anggota



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kelurahan
(Studi Pada Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang)

Disusun Oleh : Balqis Demes Piscesa

NIM : 0810310185

Fakultas : Ilmu Administrasi

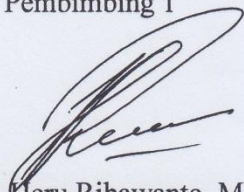
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Juli 2012

Dosen Pembimbing

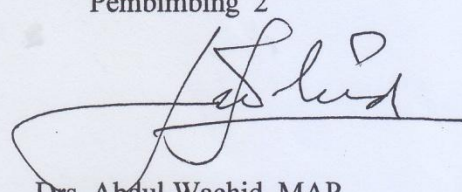
Pembimbing 1



Drs. Heru Ribawanto, MS

NIP. 19520911 197903 1 002

Pembimbing 2



Drs. Abdul Wachid, MAP

NIP. 19561209 198703 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Nama: Balqis Demes P

NIM : 0810310185

RINGKASAN

Balqis Demes Pisceca. 2012. Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang). Komisi Pembimbing, Ketua: Drs. Heru Ribawanto, MS. Anggota: Drs. Abdul Wachid, MAP. 117 Hal + xiv.

Bagi suatu negara, pembangunan menjadi suatu hal penting dan sangat dibutuhkan. Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang merata dan adil di segala bidang kehidupan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selaras dengan tuntutan kemampuan untuk melihat dan melaksanakan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air, maka sudah seharusnya jika pembangunan daerah terutama pembangunan kelurahan lebih mendapat perhatian dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan kelurahan merupakan bagian terpenting atau dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang sedang digalakkan pemerintah. Sejalan dengan hal di atas, Pemerintah Daerah Kota Malang juga terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di setiap kelurahan dengan membuat suatu kebijakan dalam membentuk suatu lembaga yang bergerak di bidang pembangunan kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya Perda No 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dengan melihat pentingnya peningkatan pembangunan bagi seluruh wilayah, maka dibentuklah LPMK ini sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembangunan kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Tunggul Wulung. Dengan adanya LPMK ini, pemerintah berharap agar terjadi pemerataan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan; metode analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Fokus penelitian ini antara lain (1) Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, mencakup: a). Hail pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan, b). Mengembangkan partisipasi masyarakat, c). Menumbuhkembangkan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, d). Tanggapan masyarakat atas kinerja LPMK. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, mencakup: a). Faktor pendukung, b). Faktor penghambat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa: (1) Kinerja dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang mengaturnya, hal ini terbukti dengan hasil pembangunan yang telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan pemberian pelatihan ketrampilan dan pembinaan kepada masyarakat, serta banyaknya tanggapan positif dan dukungan dari masyarakat mengenai hasil kinerja LPMK Kelurahan Tunggul Wulung. (2) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kinerjanya adalah dengan cara meningkatkan pembangunan yang sesuai dengan masyarakat, memberikan sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi kelompok pedagang kecil masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum bagi masyarakat. (3) Adapun faktor penghambat kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terdapat pada tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yang berpengaruh pada pola pikir masyarakat mengenai pembangunan dan tingginya tingkat pengangguran, selain itu adanya pengaruh dari penggerak sosial juga menjadi penghambat kinerja LPMK

dalam pembangunan karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada LPMK sebagai lembaga pembangunan.

Beberapa saran yang diberikan peneliti agar kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi, diantaranya adalah: (1) Sebaiknya dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga program pembangunan dapat seluruhnya terselesaikan. (2) Kekurangan lapangan pekerjaan sebaiknya segera diatasi dengan menambah lapangan kerja yang tidak hanya di prioritaskan bagi para pedagang saja tetapi juga bagi paemuda / pemuda. (3) Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketrampilan sebaiknya tidak hanya diberikan bagi pedagang kecil saja, tetapi juga bagi pemuda / pemuda agar mereka dapat memperoleh dan memiliki ketrampilan sebagai bekal membuka usaha atau bekerja, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki lapangan pekerjaan yang tetap.

Kata Kunci: Pembangunan, Kinerja, Evaluasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)



SUMMARY

Balqis Demes Piscesa, 2012. Performance Evaluation of Society Excerption Institution (LPMK) in order to Increasing the welfare of Village's Society (Study at Tunggul Wulung Village, Malang). Supervising Comission; Chairman: Drs. Heru Ribawanto, MS. Member: Drs. Abdul Wachid, MAP. 117 pages + xiv.

For some countries, development is urgently needed. Expected development itself, is akin of fair in any aspects of life, both, Central or Regional levels. In tune with the demands of the ability to see and execute development itself to all around the country, it should'nt focused in the National development, but more, the Village should have paid attention to. The importance of the Village's development as the sparehead of national development is what our government concerned to. In line with those said above, Malang's Government also constantly working to improve the welfare of these society by developing the Village with Village's development Institution policy. This can be seen by the occurrence of Perda No. 18 Tahun 2001 about the Forming of Village's Society Excerption Institution. By the importance of the increased region's development, then LPMK was formed as Village's development institution, one of which is Tunggul Wulung Village. By then, LPMK known as a Government institution that concern in all aspects of Village's development .

This research aims to discover, discribe and analyze the Performance Evaluation of Society Excerption (LPMK) in order to increasing the welfare of the village's society. This research uses qualitative research with descriptif methods. Using primary and secondary data sources; Observatory data collection, Interviews and Documentation; Research instrument used is researches themselves, guidelines for interviews, notes taken while researched, data analysis methods include data reduction, data representation, conclusion/ verification. This research focused on (1) Performance Evaluation of Society Excerption Institution (LPMK) in order to increasing the welfare of village's society, includes: a) Development in accordance with the plan that had been proposed, b) Developing community participation, c) Developing the community skill trough skills training, d) The Response of the Society for LPMK's performance, (2) Factors that affect the Performance Evaluation of Society Excerption Institution (LPMK) in order to Increasing the Welfare of the Village's Society, includes: a) Supported factors, b) Unsupported factors

This research defined that (1) Performance Evaluation of Society Excerption Institution (LPMK) in Tunggul Wulung is runs equally well, proven by result which refers to the development planning has been made before, high partisipation's society either in planning or implementation, developed human resources that has been increases by providing both coaching and skill training to the society, also positive feedback by the society itself to the Performance of Society Excerption Institution (LPMK) in Tunggul Wulung. (2) Efforts that has been done by of Society Excerption Institution (LPMK) in order to increases the performance of itself by increasing the development that suitable with the society, facilitates small medium enterprises, and also developing the infrastructure and public facilities. (3) Unsupported factors that hidrance the Performance of Society Excerption Institution (LPMK) is low education background that automatically affect the frame of thought and also high unemployment in the society, and social movements that also influence the performance of LPMK, can caused missing of people trust to the LPMK as development institution.

Researcher suggest that Society Excerption Institution (LPMK) in order to increasing the welfare society able to: (1) Doing scheduled development in order to finished the whole planned program. (2) Decreasing the unemployment with increasing the vacancies and not too focused on the bussiness but also to the unemployed human resources that available on institution area. (3) Increasing the human resources by skill training and -again- not too focused on bussines but also to the unemployed human

resources that available on institution area so they can have some skills to have their own bussines or works in company , because there still many labour in this area.

Keyword : Development, Performance, Evaluation, Society Excerpton Institution (LPMK)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmatnya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang)” ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, ditengah-tengah kesibukan beliau.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid, MAP. selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rendi Triatmojo, SE dan Bapak Jayus, S.Pd selaku Kepala dan Sekretaris Kelurahan Tunggul Wulung yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang beliau pimpin.
6. Bapak Kholik Nuriadi, Amd. Kop; Bapak Jaedi, SP; Bapak Sugeng, serta Bapak Rohis selaku Ketua LPMK dan Ketua Bidang pada LPMK Kelurahan Tunggul Wulung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada saya sehingga saya bisa mengetahui seluk beluk yang ada pada LPMK Kelurahan Tunggul Wulung.

7. Bapak Dayat, Ibu Nur Amilah, Bapak Jumadi, Saudari Yunita, serta Saudara Saiqul yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam pengambilan data-data.
8. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk terjun di lingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.
9. Teman-teman seperkuliahan yang telah memotivasi, mendukung serta membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dalam rangka proses pembelajaran yang terus menerus dan berkelanjutan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Disamping itu, penulis juga berharap agar skripsi ini berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, baik kalangan Akademis maupun Non-akademis. Semoga skripsi ini juga dapat menambah wacana dan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Malang, Juli 2012

Penulis



DAFTAR ISI

COVER

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN iv

SUMMARY vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penulisan 6

D. Kontribusi Penelitian 6

1. Aspek Teoritis 6

2. Aspek Praktis 7

E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pembangunan 10

1. Pengertian Pembangunan 10

2. Pendekatan dalam Pembangunan 11

3. Indikator Pembangunan 14

4. Pemberdayaan Masyarakat 18

B. Kesejahteraan Masyarakat 22

C. Kelembagaan 24

1. Pengertian Kelembagaan	25
2. Unsur-unsur dalam Kelembagaan	28
3. Jenis Kelembagaan	29
4. Sistem Kelembagaan	29
D. Evaluasi	30
1. Pengertian Evaluasi	30
2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi	33
3. Teknik Evaluasi	33
4. Tingkat Evaluasi	37
5. Model Evaluasi	37
6. Pendekatan dalam Evaluasi	39
E. Kinerja	42
1. Pengertian Kinerja	42
2. Indikator Kinerja	43
3. Pengukuran Kinerja	46
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	48
F. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	50
1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	51
2. Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	52
3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi dan Situs Penelitian	55
C. Fokus Penelitian	55
D. Sumber dan Jenis Data	57
E. Instrumen Penelitian	57
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum	62

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tunggul Wulung.....	62
2. Kondisi Geografis Kelurahan Tunggul Wulung.....	63
3. Keadaan Penduduk.....	63
4. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tunggul Wulung.....	67
5. Kondisi Sosiokultural Kelurahan Tunggul Wulung.....	68
6. Visi, Misi, dan Tujuan Kelurahan Tunggul Wulung.....	69
7. Pemerintah Kelurahan Tunggul Wulung.....	71
B. Penyajian Data.....	73
1. Kinerja LPMK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan.....	73
a. Hasil Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Dicanangkan Sebelumnya.....	78
b. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat.....	84
c. Menumbuhkembangkan Masyarakat Melalui Pelatihan Katrampilan.....	87
d. Tanggapan Masyarakat Atas Kinerja LPMK.....	89
2. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kinerja LPMK dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kelurahan.....	91
a. Faktor Pendukung.....	92
b. Faktor Penghambat.....	95
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	98
1. Kinerja LPMK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan.....	98
a. Hasil Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Dicanangkan Sebelumnya.....	98
b. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat.....	101
c. Menumbuhkembangkan Masyarakat Melalui Pelatihan Katrampilan.....	104
d. Tanggapan Masyarakat Atas Kinerja LPMK.....	105
2. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kinerja LPMK dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kelurahan.....	107
a. Faktor Pendukung.....	107
b. Faktor Penghambat.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Jumlah penduduk menurut usia	64
2.	Jumlah penduduk menurut jenis agama	65
3.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	66
4.	Daftar mata pencaharian penduduk	67
5.	Daftar sarana pendidikan	69
6.	Perangkat pemerintahan Kelurahan Tunggul Wulung	72
7.	Susunan organisasi LPMK Kelurahan Tunggul Wulung	74
8.	Daftar program pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung	80



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Pedoman Wawancara
2.	Curriculum Vitae
3.	Surat Keterangan Penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4.	Surat Keterangan Penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
5.	Surat Keterangan Penelitian Kelurahan Tunggul Wulung
6.	Denah Kelurahan Tunggul Wulung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara yang sedang berkembang seperti yang terjadi di Indonesia, pembangunan sangat dibutuhkan. Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang merata dan adil di segala bidang kehidupan. Siagian (2003) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “ suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) ”. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004) mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat.

Pembangunan merupakan serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari sesuatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.

Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Indonesia, sebagai kelompok negara berkembang pada umumnya melakukan dan sedang di dalam proses perubahan-perubahan sosial yang besar. Proses atau usaha-usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik, minimal ada peningkatan dari kondisi yang sekarang ini.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang lebih baik, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru, diantaranya adalah Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga Kebijakan tentang Kelurahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Kelurahan. Sesuai adanya kebijakan mengenai kelurahan dan adanya tuntutan kemampuan untuk melihat dan melaksanakan pembangunan keseluruhan pelosok tanah air menuju kepada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah seharusnya pembangunan di tingkat kelurahan lebih mendapat perhatian dalam pembangunan nasional. Pembangunan kelurahan merupakan bagian terpenting atau bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak daripada pembangunan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Oleh

karena itu berhasil tidaknya pembangunan kelurahan akan sangat menentukan bagi proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Disadari bahwa pembangunan kelurahan telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Pembangunan kelurahan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pembangunan kelurahan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan kelurahan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan kokoh. Pembangunan kelurahan dilaksanakan oleh pemerintah dan badan-badan pembangunan bersama-sama dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini dimaksudkan agar pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna sekaligus tepat sasaran dengan tujuan pembangunan kelurahan sesuai aspirasi dan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pembangunan di setiap kelurahan. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan yang saat ini dilakukan adalah pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang intinya merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan kelurahan. Salah satu wujud kebijakan tersebut adalah dengan disusun dan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tentang

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Malang.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan kelurahan. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pembentukan LPMK sebagai salah satu mitra Pemerintahan Kelurahan diharapkan dapat membantu dalam meratakan pembangunan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di masing-masing kelurahan. Kebijakan ini berjalan di setiap kelurahan yang ada di Kota Malang, salah satunya di Kelurahan Tunggul Wulung. Kelurahan Tunggul Wulung merupakan salah satu kelurahan baru yang ada di Kota Malang. Kelurahan ini dikatakan baru karena Kelurahan Tunggul Wulung baru bergabung dengan Kota Malang pada tahun 1999 yang lalu dalam rangka perluasan wilayah Kota Malang.

Sebagai suatu kelurahan yang baru, Kelurahan Tunggul Wulung terus meningkatkan pembangunan di wilayahnya agar tidak tertinggal dari wilayah kelurahan lain. Berbagai pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain perangkat LPMK, masyarakat juga turut serta dalam pembangunan melalui sumbangan ide atau pikiran pada perencanaan hingga sumbangan tenaga dan biaya pada pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di kelurahan dilaksanakan melalui

Musrenbangkel yang dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat, perwakilan LPMK, serta beberapa perwakilan perangkat kelurahan. Selain melalui perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat di Kelurahan Tunggul Wulung juga terlihat dari terlibatnya masyarakat dalam beberapa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Tunggul Wulung.

Dari rangkaian di atas, sebuah asumsi menarik dapat terlihat bahwa keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah tidak lepas dari peran serta lembaga-lembaga lainnya, dalam hal ini LPMK. LPMK merupakan lembaga yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, yang anggotanya terdiri atas masyarakat-masyarakat di lingkungan kelurahan tersebut, sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang berada paling dekat dengan masyarakat. Karena dibentuk atas prakarsa masyarakat, LPMK diharapkan dapat benar-benar menampung dan mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan memajukan pembangunan kelurahan.

Sebagai lembaga baru yang berjalan sejak 2001 lalu, LPMK tentu masih memiliki beberapa kekurangan dalam melaksanakan tugas, terutama pelaksanaan kinerjanya sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembangunan di tingkat kelurahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Atas dasar latar belakang di atas yang telah disampaikan, maka peneliti memilih judul sebagai berikut **“Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan dan identifikasi masalah yang menjadi latar belakang kajian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja LPMK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPMK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam pembangunan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh serta sebagai sarana pengembangan Ilmu Administrasi Publik sekaligus menambah pengetahuan atas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dan stakeholder, ke arah perbaikan terhadap kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi/kelembagaan dan dapat dijadikan parameter keberhasilan atau kegagalan program-program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk mengeluarkan aspirasi mereka dalam mewujudkan pembangunan dan kemandirian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak yang berkepentingan yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkesinambungan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penulis adalah merupakan suatu susunan atau cara urutan pembahasan. Dalam skripsi ini oleh penulis dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab berisi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menerangkan dan menjelaskan kerangka dasar teori yang berkaitan dengan pembangunan, evaluasi, kinerja, dan kelembagaan khususnya mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) secara umum.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mencoba menganalisa tentang hasil penelitian guna mengetahui bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakatnya Kelurahan Tunggul Wulung. Selain itu dalam bab ini akan dijabarkan tentang fokus-fokus penelitian yang ada di bab 3.

Bab V Kesimpulan dan Saran, kesimpulan pada bab ini didasarkan pada analisis data mengenai kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Tunggul Wulung. Saran-saran diberikan dengan mengutarakan kesimpulan dari seluruh isi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Proses atau usaha-usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik.

Penggunaan kata pembangunan telah dipopulerkan oleh para sarjana dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat, dan diperkenalkan ke Eropa Barat dan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Pembangunan berasal dari kata *development*. Kata *development* ini diartikan sebagai pembangunan atau perkembangan dan perubahan sosial. Menurut Sondang P. Siagian (2003) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik (Soemarwoto, 1983). Merujuk pada definisi tersebut, hakekat pembangunan sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan dan dalam konteks yang lebih riil adalah peningkatan kesejahteraan yang baik. Kesejahteraan menjadi inti dari pembangunan yang selama ini didengungkan, karena pada dasarnya objek pembangunan itu sendiri adalah manusia yang berperan sebagai penikmat sekaligus pelaksana pembangunan. Jika kesejahteraan manusia terjamin maka besar kemungkinan keberlanjutan lingkungan hidup akan terjamin begitupula sebaliknya.

2. Pendekatan Dalam Pembangunan

Pembangunan meniscayakan transformasi struktural dalam segala aspek kehidupan, baik perubahan kultural, politik, sosial, ekonomi, maupun yang lainnya. Teori-teori yang dibangun terkait dengan pembangunan sangat terkait erat dengan strategi pembangunan. Teori pembangunan memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan dan mengalami perubahan besar dalam proses tersebut. Teori-teori yang dirumuskan para pakar hingga saat ini jumlahnya banyak sekali. Namun, bila kita bicara teori pembangunan ada 3 teori besar yang sering dibahas, yaitu teori modernisasi, dependensi dan sistem dunia:

a. Teori Modernisasi

Teori Modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui proses pengembangan yang

digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini. Secara teoritik, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

b. Teori Depedensi

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga.

c. Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia adalah adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara yaitu negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan

kesemuanya akan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. (www.butonutara.blogspot.com)

Selain tiga teori di atas, LAN-RI (2001: 23) menyebutkan ada beberapa pendekatan dalam pembangunan yang telah dikemukakan sejak tahun 1950-an, beberapa diantaranya adalah teori Rostow, Harrord-Domar, Rosenstein-Rodan dan Hirschman, Solow dan teori Endogenous. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Rostow

Teori W.W. Rostow ini mengatakan bahwa proses pembangunan dari semua negara dari yang belum berkembang menjadi yang telah berkembang harus melalui tahapan tertentu. Tahapannya adalah sebagai berikut: tahap masyarakat tradisional (*traditional society*), tahap prakondisi agar dapat tinggal landas menuju pertumbuhan berkelanjutan (*precondition for take-off into self sustaining growth*), tahap lepas landas (*take-off*), tahap dorongan menuju kedewasaan (*drive to maturity*), dan tahap konsumsi tinggi secara massa (*high mass consumption*).

b. Teori Harrord-Domar

Teori Harrord-Domar merupakan teori yang memberi rincian lebih lanjut atas pernyataan Rostow bahwa pertumbuhan dan pembangunan suatu negara mempersyaratkan adanya tingkat tabungan yang cukup besar.

c. Teori Rodenstein-Rodan dan Teori Hirschman

(1) Teori Rodenstein-Rodan

Teori Rodenstein-Rodan selain memberi tekanan pada perubahan struktural segi produksi dan permintaan, juga memberi tekanan pada pentingnya perubahan ini dilakukan secara besar-besaran dan serentak. Dengan demikian teori ini mengandung dua kata kunci yang menjadi ciri pokok kerangka pemikirannya, yaitu “keterkaitan industri” dan “big push (dorongan besar)”. Kedua kata kunci ini bersamaan menghasilkan kata kunci ketiga, yaitu kata “pertumbuhan berimbang.”

(2) Teori Hirschman

Teori Hirschman meskipun disatu pihak senada dengan Rodenstein-Rodan mengenai perlu adanya keterkaitan antara industri, dilain pihak mengemukakan strategi yang berbeda dalam hal-hal berikut: (a) menurut Hirschman, pembangunan *social head capital* (SOC) tidak selalu harus mendahului pembangunan kegiatan produktif langsung; (b) Hirschman berpendapat bahwa berbagai jenis industri tak perlu serentak dibangun, yang perlu justru penciptaan ketidakseimbangan melalui pembangunan industri yang strategis

terlebih dahulu. Teori Hirschman juga menunjukkan perlunya peranan negara dalam membangun SOC. Meskipun demikian, ia tidak menyetujui campur tangan pemerintah dalam kegiatan produktif langsung yang seharusnya diserahkan kepada sektor swasta.

d. Teori Solow

Teori ini disebut juga sebagai teori neo-klasik. Aliran neo-klasik ini mengatakan bahwa kurang berhasilnya pembangunan justru karena pemerintah terlalu banyak mengadakan intervensi.

e. Teori Pertumbuhan Endogenous

Teori Pertumbuhan Endogenous mengemukakan bahwa ada penyebab lain dalam meningkatkan pembangunan selain perubahan teknologi, yaitu penyebab endogen, yang dapat menciptakan pertumbuhan. Menurut teori Pertumbuhan Endogenous, penyebab lain yang dari dalam ini adalah peranan pemerintah maupun swasta dalam menciptakan yang dinamakannya sebagai “*complementary investment*”, yang pada dasarnya berbentuk investasi dalam riset (R&D), pendidikan, dan infrastruktur.

3. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Berikut ini, akan disajikan ringkasan terhadap kelima indikator pembangunan :

a. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

b. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

d. Angka Tabungan

Perkembangan sektor industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

e. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf.

f. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. (www.profsyamsiah.wordpress.com)

Selain indikator-indikator pembangunan di atas, menurut LAN-RI (2001: 44), ada beberapa indikator dalam meningkatkan pembangunan yaitu indikator pembangunan ekonomi (makro), indikator pembangunan non-ekonomi dan indikator pembangunan gabungan (HDI).

a. Indikator pembangunan ekonomi (makro)

Beberapa indikator ekonomi tersebut yaitu:

- (1) Pendapatan per kapita
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi di Indonesia, untuk mengukur pendapatan nasional biasanya digunakan PDB atau Produk Domestik Bruto.
- (2) Pertumbuhan ekonomi
Indikator ini dapat dikatakan sebagai “jangkar” perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar jumlah tenaga kerja yang harus diserap, semakin besar kemungkinan kenaikan pendapatan per kapita, dan semakin besar kemampuan perekonomian untuk menerima jumlah beban utang tertentu atau defisit anggaran tertentu.
- (3) Laju inflasi
Indikator ini menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang diukur oleh perkembangan Indeks Harga Konsumen. Pengendalian laju inflasi ini penting karena peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus diukur dari daya beli masyarakat yaitu nilai nominal setelah disesuaikan dengan laju inflasi.
- (4) Surplus/defisit APBN/PDB
Anggaran ini merupakan indikator kinerja APBN dalam peranannya untuk memberi stimulus (ekspansif) ataupun memberi pengaruh kontraktif pada perekonomian. Indikator ini penting sebagai patokan agar dapat terpelihara disiplin anggaran.
- (5) Sumbangan pertumbuhan ekonomi
Indikator ini dapat memberi gambaran tentang seberapa jauh pertumbuhan ekonomi tertentu dapat berlanjut. Salah satu syarat penting dari pertumbuhan berkelanjutan ini adalah agar sumber pertumbuhan investasi harus berkeseimbangan dengan sumber pertumbuhan konsumsi.
- (6) Investasi dan sumber pembiayaan.
Indikator ini erat hubungannya dengan teori Harrod-Domar yang menunjukkan besarnya peranan investasi dan adanya keseimbangan investasi dengan tabungan.

b. Indikator pembangunan non-ekonomi

Beberapa indikator pembangunan non-ekonomi adalah sebagai berikut:

(1) Di bidang hukum

Dalam program pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, beberapa indikator kinerjanya adalah: (a) meningkatnya peran dan fungsi program legislasi nasional; (b) meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang lebih berkualitas.

(2) Di bidang sosial budaya

Dalam program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat, maka beberapa indikator kinerjanya adalah: (a) meningkatnya presentase keluarga yang menggunakan air bersih di perkotaan dan pedesaan; (b) meningkatnya presentase tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan; (c) meningkatnya presentase keluarga yang menghuni rumah sehat.

(3) Di bidang politik

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya dan meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat.

c. Indikator pembangunan gabungan (HDI)

HDI diciptakan oleh UNDP berdasarkan pandangan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dilihat hanya dengan ukuran pendapatan nasional. Karenanya telah disusun indikator sosio-ekonomi yang lebih komprehensif dalam bentuk HDI. HDI merupakan gabungan dari tiga unsur utama pembangunan manusia, yaitu harapan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) yang diukur oleh tingkat melek orang dewasa serta rata-rata tahun bersekolah, kesejahteraan ekonomi (*standart of living*) yang diukur oleh PDB per kapita setelah disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*).

Dalam rangka peningkatan pembangunan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang banyak dilakukan adalah program pemberdayaan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan bahwa, hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat,

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat. Menyadari bahwa tercapainya Pembangunan Nasional merupakan kemauan dari masyarakat Indonesia, maka di dalam menyongsong era globalisasi yang ditandai dengan makin ketatnya persaingan bebas maka perlu kiranya adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu maka pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah yang memungkinkan daerah, untuk menstabilisasikan segala potensi yang dimiliki harus bertindak proaktif untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, memanfaatkan sumber daya alam, menjalin kerjasama dengan para stakeholder. Dengan model pemberdayaan masyarakat selalu mengacu pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta sistem nilai sosial budaya dan nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat senantiasa bertumpu pada masyarakat dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan maknanya bahwa : **kata Daya** memiliki pengertian (a) Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak (b) Kekuatan, tenaga (yang menyebabkan segala sesuatu bergerak) (c) Muslihat (d) Akal, ikhtiar, upaya. Sementara **kata Berdaya** mengandung pengertian : (a) Berkekuatan, kemampuan, bertenaga (b) Mempunyai akal (cara, muslihat) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya. Dengan demikian makna **Pemberdayaan Masyarakat** pada hakekatnya mempunyai 2 (dua) makna pokok yaitu : Pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Kedua, memberikan wewenang secara proposional kepada

masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri dan lingkungannya secara mandiri. Upaya memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. ([http://lampungbarat.go.id/Pemberdayaan Masyarakat, Percepat Pembangunan Pekon](http://lampungbarat.go.id/Pemberdayaan_Masyarakat,_Percepat_Pembangunan_Pekon)).

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik kita sebut ketahanan nasional. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Melalui upaya pemberdayaan akan terwujud profil keberdayaan masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat mencakup 3 (tiga) aspek, yakni : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun non-fisik. Ketiga, melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi.

Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi: **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena

itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dsb manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan

yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat.

Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.

Paradigma pembangunan yang terus berkembang dalam setiap perjalanan sejarah tiap komunitas manusia yang disebut negara adalah cerminan dari upaya setiap manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik maupun psikologis. Terpenuhinya seluruh aspek kebutuhan inilah yang kemudian kita sebut sebagai kondisi sejahtera.

Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa, makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, tidak kurang suatu apapun (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).

Adapun dimensi kesejahteraan adalah sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari aspek tertentu. Catatan Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada dasarnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasarnya. Semakin terpenuhinya kebutuhan mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesejahteraan yang dirasakan.

C. Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Sedangkan pakar spesialis kelembagaan hanya memusatkan perhatian pada kode etik, aturan main, sedangkan sebagian hanya melihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan manajemennya. Kebanyakan analisis kelembagaan saat ini memadukan organisasi dan aturan main. Analisis mungkin akan menjadi lebih kompleks tetapi bisa dicari hal-hal pragmatis yang bisa diterjemahkan ke dalam strategi pengembangan. Logika analisis institusi bisa dipakai untuk menjelaskan kegagalan pemerintah dan negara atau kegagalan pasar atau kegagalan berbagai model pembangunan.

Pendekatan pembangunan kelembagaan sebenarnya sudah lama dibicarakan terutama dari sudut pandang antropologi, sosiologi, dan politik. Pendekatan analisis kelembagaan juga dipakai dalam ilmu tentang tingkah laku organisasi. Bersamaan dengan berkembangnya penelitian-penelitian dalam bidang ilmu ini dan adanya temuan dari kegagalan berbagai model pembangunan yang direkomendasikan Bank Dunia pun melakukan reorientasi kebijakan mereka dalam memberikan dukungan pembangunan baik dalam bentuk penjaminan (*loan*) ataupun bantuan (*grant*).

1. Pengertian Kelembagaan

Lembaga adalah aturan di dalam kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Lembaga adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur suatu hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi dapat ditentukan oleh beberapa unsur aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada

peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk berfikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini dan memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Para ilmuwan sosial yang memiliki latar belakang yang beragam mendefinisikan kelembagaan secara beragam menurut sudut pandang keilmuwanannya. Douglas North mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi (North, 1990 dalam Hidayat, 2007: 18). Senada dengan North, Schmid dalam Hidayat (2007: 18) mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku di masyarakat, kelompok, atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Menurut Schotter dalam Hidayat (2007: 18), kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang. Sedangkan Ostrom dalam Hidayat (2007: 18) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang harus atau tidak boleh disediakan, dan keuntungan apa yang

individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi diantara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial.

Merangkum dari berbagai pengertian yang dikemukakan sebelumnya, maka yang dimaksud kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antar anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kelembagaan adalah *social form*. Ibarat organ-organ dalam tubuh manusia.

Kata “kelembagaan” menunjuk kepada :

- a. Sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup di dalam masyarakat
- b. Suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang
- c. Merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola
- d. Berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat
- e. Ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern
- f. Berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial
- g. Merupakan kelompok sosial yang menjalankan masyarakat

- h. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu (kelembagaan pendidikan, agama, ekonomi, dan lain-lain)

2. Unsur-unsur Kelembagaan

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, diantaranya adalah :

- a. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
- b. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
- c. Peraturan dan penegakan aturan / hukum
- d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak, dan kewajiban anggota
- e. Kode etik
- f. Kontrak
- g. Pasar
- h. Hak milik
- i. Organisasi
- j. Intensif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan

(www.scribd.com)

3. Jenis Kelembagaan

a. Lembaga Struktural

Lembaga struktural adalah unit pelaksana yang keberadaanya secara tegas terdapat dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Pimpinan lembaga struktural ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan teratas dalam lembaga.

b. Lembaga Non Struktural

Lembaga non struktural adalah bagian dari unsur penunjang suatu lembaga yang berupa badan organisasi dan atua bentuk lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh suatu lembaga di luar struktur yang sudah ada menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(www.uin-suska.ac.id)

4. Sistem Kelembagaan

a. Sistem Hukum

Aturan yang menjadi dasar jalannya suatu kelembagaan. Aturan kelembagaan yaitu aturan yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam membangun kelembagaannya. PP no. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah bahwa besaran kelembagaan pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan 3 variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

b. Sistem Nilai

Nilai adalah suatu yang berharga, berguna yang memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Kapan kelembagaan itu punya nilai? Jika didalamnya memuat beberapa nilai yaitu :

- (1) Nilai kebenaran : kelembagaan itu menjadi berguna dan berharga
- (2) Nilai estetis : kelembagaan itu menjadi indah dan menarik

c. Sistem Akuntabilitas (pertanggungjawaban)

Urgensi akuntabilitas kelembagaan publik: tugas-tugas lembaga publik lebih kompleks dari pada lembaga bisnis. Lembaga publik punya orientasi ganda sedangkan lembaga bisnis berorientasi tunggal. Sistem akuntabilitas adalah system pertanggungjawaban lembaga publik dalam rangka peningkatan kinerja dan responsivitas terhadap kebutuhan dan kepentingan publik. (www.masbied.com)

D. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000: 220).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Evaluasi merupakan pengawasan manajerial untuk mendapat hasil yang sesungguhnya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan.

Evaluasi adalah sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur se-obyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, di mana beberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.

Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009: 3) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Menurut Crawford dalam Astutik (2007 ; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

3. Teknik Evaluasi

Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik non-tes (alternative test).

- a. Teknik non tes menurut Arikunto (2002:26) adalah penilaian atau evaluasi yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta, melainkan dengan cara: skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, riwayat hidup.
 - 1) Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Angka-angka diberikan secara bertingkat dari angka terendah hingga angka paling tinggi.
 - 2) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. Dari segi pemberi jawaban, kuesioner dibagi menjadi kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Kuesioner langsung adalah kuesioner yang dijawab langsung oleh orang yang diminta jawabannya. Sedangkan kuesioner tidak langsung dijawab oleh secara tidak langsung oleh orang yang dekat dan mengetahui si penjawab. Dan bila ditinjau dari segi cara menjawab maka kuesioner terbagi menjadi kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang memiliki dua atau lebih jawaban dan si penjawab hanya memberikan tanda silang (X) atau cek (✓) pada jawaban yang ia anggap sesuai. Sedangkan kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan dimana si penjawab diperkenankan memberikan jawaban dan pendapat nya secara terperinci sesuai dengan apa yang ia ketahui.
 - 3) Daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan pernyataan beserta dengan kolom pilihan jawaban. Si penjawab diminta untuk memberikan tanda silang (X) atau cek (✓) pada jawaban yang ia anggap sesuai.
 - 4) Wawancara, suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara dibagi dalam 2 kategori, yaitu pertama, wawancara bebas yaitu si penjawab (responden) diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Kedua adalah wawancara terpimpin dimana pewawancara telah menyusun pertanyaan

pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja.

- 5) Pengamatan atau observasi, adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Pengamatan atau observasi terdiri dari 2 macam yaitu : (a) observasi partisipan yaitu pengamat terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati. (b) observasi sistematis, pengamat tidak terlibat dalam kelompok yang diamati.
- 6) Riwayat hidup, evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai objek evaluasi sepanjang riwayat hidup objek evaluasi tersebut.

b. Teknik tes menurut Indrakusuma dalam Arikunto (2002: 32) adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Teknik tes meliputi:

1) Tes subjektif

Tes ini sering pula diartikan sebagai tes essay yaitu tes hasil belajar yang terdiri dari suatu pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang bersifat uraian dan atau penjelasan. Secara umum tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, penjelasan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri.

2) Tes objektif

Maksudnya adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatsi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk essay. Dalam penggunaan tes objektif ini jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari pada tes essay. Tes objektif disebut juga dengan istilah *short answer test* atau *new type test*. Yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan cara memilih diantara alternatif jawaban yang dianggap benar dan paling benar.

Sedangkan Hisyam Zaini, dkk. mengelompokkan tes sebagai berikut:

a. Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor secara objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa option untuk dipilih peserta tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain: tes esai, lisan.

b. Menurut ragamnya; tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas (*restricted essay*), dan tes esai bebas (*extended essay*). Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tes benar-salah (*true-false*), tes menjodohkan (*matching*), dan tes pilihan ganda (*multiple*

choice). Teknik non-tes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di antaranya adalah: angket (*questionnaire*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), skala bertingkat (*rating scale*), sosiometri, paper, portofolio, kehadiran (*presence*), penyajian (*presentation*), partisipasi (*participation*), riwayat hidup, dan sebagainya. (www.dokumens.multiply.com/journal)

4. Tingkat Evaluasi

- a. Pra Evaluasi, ada hubungan dengan pengarahan suatu proyek. Misalnya, perlu ada manajemen yang baik agar proyek/program dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana.
- b. Evaluasi Antara, adalah evaluasi pada pertengahan implementasi, yaitu evaluasi ketika program atau proyek sedang mengatasi masalah. Hasil ini dapat dipakai untuk memodifikasi perencanaan atau strategi program/proyek. Misal, merubah sifat input, memodifikasi model intervensi dan menggeser penekanan atau kelompok target.
- c. Evaluasi Akhir, adalah evaluasi ketika pembiayaan program/proyek tersebut berakhir. Evaluasi ini memberikan persepsi manfaat program dan dampak terhadap kegiatan. Rekomendasi ini adalah untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kebijakan.

5. Model Evaluasi

Dalam melakukan proses evaluasi, ada beberapa model yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi dalam menilai suatu program pembangunan, yaitu :

a. Sistem *assessment*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.

b. Program *planning*

Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

c. Program *implementation*

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.

d. Program *Improvement*

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

e. *Program Certification*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

6. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengetahui pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting. Ada beberapa pendekatan umum dalam melakukan evaluasi yaitu:

a. Pendekatan pertama adalah *objective-oriented approach*.

Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/proyek yang bersangkutan.

- b. Pendekatan kedua adalah pendekatan *three-dimensional cube* atau *Hammond's evaluation approach*.

Pendekatan Hammond melihat dari tiga dimensi yaitu *instruction* (karateristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi program/proyek), *institution* (karakteristik individual peserta, instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan *behavioral objective* (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, meliputi tujuan kognitif, afektif dan psikomotor)

- c. Pendekatan ketiga adalah *management-oriented approach*.

Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model CIPP: *context-input proses-product*). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu ditingkatkan.

- d. Pendekatan keempat adalah *goal-free evaluation*

Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal.

e. Pendekatan kelima adalah *consumer-oriented approach*

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti software, buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu Pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai dengan penggunaannya, atau apakah diperlukan dan penting untuk program/proyek yang dituju.

f. Pendekatan keenam adalah *expertise-oriented approach*

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, dalam artian jadwal dispesifikasikan atau tidak dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai kegunaan suatu program/proyek, karena itu disebut *subjective professional judgement*.

g. Pendekatan ketujuh adalah *adversary-oriented approach*

Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang menentukan argumen evaluator mana yang diterima. Untuk melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, meminimalkan bias individu dan mempertahankan pandangan yang seimbang.

h. Pendekatan terakhir adalah *naturalistic & participatory approach*

Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para stakeholder. Hasil dari evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa yang menilai.

Berbagai pendekatan untuk mengevaluasi suatu program atau proyek diterapkan untuk mendapatkan keefektifan dan keefisienan program atau proyek tersebut baik secara internal yaitu pihak pengembang atau pengelola, maupun secara eksternal yaitu pengguna. Bentuk-bentuk pendekatan evaluasi yang telah ada harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sebagai tujuan utama suatu program dijalankan.

E. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Ada beberapa pendapat tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Rue & Byars dalam Pasolong (2007: 175), mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan (1969: 15), adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland (1995: 113), mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha (1997: 112), mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan

Widodo (2006: 78), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI dalam Pasolong (2007: 175), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Selanjutnya Gibson (1990: 40) mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Keban (1995: 1) kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. Sedangkan Timpe (1998: 9) kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitian Timpe menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam produksi dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan sebaliknya. Mangkunegara (2002: 67) mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Prawirosentono (1999: 2) mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI Pasolong (2007: 177), adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

Lebih lanjut LAN-RI mendefinisikan indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja menurut LAN-RI, yaitu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan/atau kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Dengan demikian indikator kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi: (a) tahapan perencanaan, (b) tahap pelaksanaan, (c) tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja, yaitu: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat terukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (c) dapat menunjukkan pencapaian, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, (d) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan (e) efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

Dwiyanto (2006: 50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

- a. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
- c. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

- e. Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

Kumorotomo (1996), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja suatu organisasi, antara lain:

- a. Efisiensi. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
- b. Efektivitas. Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
- c. Keadilan. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
- d. Daya Tanggap. Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004: 108) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja antara lain :

- a. Pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan.
- b. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan.
- c. Efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran.
- d. Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai.
- e. *Equity*, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

Ukuran-ukuran kinerja tersebut tidak mutlak sama antara organisasi sektor publik yang satu dengan lainnya. Penggunaan ukuran-ukuran kinerja tersebut

sangat tergantung pada karakteristik organisasi dan jenis pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan / atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Gary Dessler dalam Pasolong (2007: 182) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata. Donovan dan Jackson (1991: 329) mengatakan bahwa secara teoritis penilaian kinerja sangat erat kaitannya dengan analisis pekerjaan. Artinya, suatu penilaian tidak dapat dilakukan jika masih terdapat ketidakjelasan tentang pekerjaan itu sendiri. Karena itu, efektivitas penilaian sangat tergantung pada penjelasan batasan atau definisi dari suatu pekerjaan itu sendiri, yang merupakan sumber daya manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penilaian kinerja sangat tergantung kepada baik buruknya manajemen sumber daya manusia yang dimiliki.

Selain penjelasan di atas, Nasucha (2004: 110) mengatakan bahwa hasil dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menentukan beberapa hal antara lain :

- (1) menentukan bahwa keuntungan dan pengaruh yang sedang berjalan dapat dicapai, (2) memperoleh jaminan bahwa tujuan dapat dan sedang dicapai, (3) memonitor dan mengontrol perkembangan dari rencana yang ditetapkan, (4) memastikan penggunaan sumber-sumber daya, (5) menilai efektivitas dari sebuah aktivitas, (6) menyediakan sebuah dasar untuk menghitung penghargaan dan insentif, (7) menentukan bahwa *value for money* dapat diperoleh. Hal yang terakhir senada dengan pendapat Mardiasmo dalam Pasolong (2007: 185) mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi *value for money* di sektor publik. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan. Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins dalam Pasolong (2007: 186), adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi: (a) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (b) kemampuan fisik,

yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan ketrampilan.

2. Kemauan. Kemauan atau motivasi menurut Robbins dalam Pasolong (2007: 187), adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (a) pengaruh lingkungan fisik, seperti lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan berisik, dan sebagainya. (b) pengaruh lingkungan sosial yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh pegawai lain.
3. Energi. Energi menurut Jordan E. Ayan dalam Pasolong (2007: 187), adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat. Mihaly Csikszentmihalyi dari Universitas Chicago dalam Ayan dalam Pasolong (2007: 188), telah melakukan riset tentang pentingnya energi sebagai unsur terpenting dalam keberhasilan intelektual dan kreatif.
4. Teknologi. Teknologi menurut Gibson dkk dalam Pasolong (2007: 188), adalah tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Penerapan teknologi menurut Bill Creech dalam Pasolong (2007: 188), adalah lebih cenderung positif dan proaktif pegawai dalam melakukan pekerjaan, karena mereka memandang

teknologi sebagai teman, bukan sebagai musuh untuk meningkatkan kinerja.

5. Kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas kikerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat kompensasi yang setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan tenang dan tekun. Akan tetapi bila pegawai merasa kompensasi yang diterima jauh dari memadai, maka pegawai berfikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan tambahan di luar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir.
6. Kejelasan Tujuan. Kejelasan tujuan merupakan faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan atau kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2006: 81), mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasinya dan menentukan pula kriteria kerjanya.
7. Keamanan. Keamanan pekerjaan menurut George Strauss & Leonard Sayles dalam Pasolong (2007: 189), adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat. Oleh sebab itu tidak cukup bagi seseorang dengan terpenuhinya kebutuhan fisik mereka dari hari ke hari, tetapi mereka ingin memastikan bahwa

kebutuhan mereka akan terus terpenuhi di masa yang akan datang. Seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaan berpengaruh terhadap kinerjanya.

F. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pembangunan masyarakat kelurahan merupakan gerakan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar ini maka kesadaran, peran serta, dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan aspirasi dan aktifitas segenap lapisan masyarakat di setiap kelurahan dibentuk LPMK, yang salah satu tugas pokoknya adalah merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah.

Untuk mewujudkan berlangsungnya perencanaan partisipatif diperlukan suatu lembaga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga ini harus menggerakkan dan mendorong seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), sebagai lembaga masyarakat di kelurahan, adalah lembaga yang paling tepat bagi berlangsungnya perencanaan partisipatif.

Berdasarkan hal itu, maka pembangunan masyarakat kelurahan seharusnya merupakan gerakan pembangunan yang berdasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Dari sinilah kesadaran, peran serta dan

swadaya masyarakat itu perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban.

1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

LPMK adalah lembaga masyarakat kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan keamanan.

2. Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

LPMK bertujuan membantu pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi LPMK adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

adalah :

a. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan di bidang pembangunan fisik dan non fisik.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai wadah

partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan lembaga

yang bersifat lokal non politis dan secara organisasi berdiri sendiri.

2. Tugas Pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

adalah :

a. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.

b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

c. Mengawasi pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan.

3. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah :

a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan.

b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

c. Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu oleh masyarakat.

d. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, objek tiap kondisi, sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Jadi metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bodgan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian, masalah, serta fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Adapun lokasi yang di pilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang, Jalan Arumba No. 6. Adapun alasan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut adalah karena kelurahan tersebut merupakan salah satu daerah pemekaran wilayah yang mulanya termasuk dalam wilayah kabupaten, sehingga sangat menarik untuk di teliti dalam hal pemberdayaan masyarakatnya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditetapkan oleh peneliti agar penelitian tidak mengembangkan ke masalah lain. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang akan di analisa guna mendapatkan gambaran tentang evaluasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Evaluasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.
 - a. Hasil pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan sebelumnya;
 - b. Mengembangkan partisipasi masyarakat;
 - c. Menumbuhkembangkan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan;
 - d. Tanggapan masyarakat atas kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.
 - a. Faktor pendukung kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan kelurahan.
 - b. Faktor penghambat kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan kelurahan.

D. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam rangka menyusun skripsi ini adalah data sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung dengan sumber data pada Ketua LPMK Kelurahan Tunggul Wulung dan staf-staf, perangkat Kelurahan Tunggul Wulung dan staf-staf, dan beberapa masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung melalui proses wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari karyawan, arsip, atau catatan serta literatur yang ada pada Kantor LPMK maupun yang diperoleh penulis sendiri. secara spesifik dapat dilihat dalam sejarah berdirinya LPMK, struktur organisasi LPMK, visi dan misi LPMK, serta tugas dan fungsi dari LPMK tersebut. Sumber data yang penulis peroleh adalah dari dokumen LPMK, dokumen kelurahan, media elektronik (internet), dan buku-buku penunjang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data, maka instrumen yang digunakan adalah :

1. Peneliti Sendiri

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari pengamatan yang ikut berperan serta. Namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. (Moleong, 2006: 163)

2. *Interview Guide* (pedoman wawancara)

Dalam hal ini penulis menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis besar hal-hal yang ditanyakan dalam proses wawancara. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa sumber wawancara berasal dari beberapa perangkat.

3. *Field Notes* (catatan lapangan)

Merupakan catatan penulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

4. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang mendukung dan hasil wawancara selama penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat akan memudahkan dan mengarahkan dalam mengolah serta menganalisa data lebih lanjut. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan tertuju pada objek penelitian, kemudian mencatat apa saja yang telah diamati untuk pemenuhan tujuan penelitian.

2. Interview (Wawancara)

Metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan pihak responden yang terkait dengan objek penelitian. Data yang diperlukan dalam interview ini adalah gambaran umum tentang pembentukan, peran, fungsi, struktur organisasi, kebijakan-kebijakan LPMK serta pelaksanaannya pada Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang. Pada penyusunan skripsi ini, penulis melakukan proses wawancara pada beberapa perangkat LPMK, perangkat kelurahan, serta beberapa masyarakat. Dari perangkat LPMK yaitu Bapak Kolik sebagai Ketua LPMK; Bapak Jaedi, Bapak Sugeng, dan Bapak Rohis sebagai staf LPMK. Dari perangkat kelurahan yaitu Bapak Jayus sebagai Sekretaris Kelurahan; Bapak Riyanto dan Bapak Fredik sebagai staf kelurahan. Dan dari masyarakat yaitu Bapak Dayat, Ibu Nur Amilah, Saudari Yunita, Bapak Jumadi, dan Saudara Saiqul.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, dan peraturan yang sehubungan dengan objek penelitian. Metode ini diperlukan untuk mempelajari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan satatan masa lalu yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk di teliti lebih lanjut.

G. Analisis Data

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data menurut Moleong (2002: 103) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarnakan oleh data. Dalam penelitian ini menggunakan analisa data yang telah dikembangkan oleh Mattew (1992: 15-20), yaitu analisa data kualitatif ini terdiri dari tiga prosedur :

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi pasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dokumen, laporan, catatan, dan arsip mengenai data-data yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi terkumpul yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara, maupun pengambilan data yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

3. Menarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini, kesimpulan mengenai kinerja LPMK Kelurahan Tunggul Wulung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tunggul Wulung

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Seperti halnya kota-kota besar lainnya, pembangunan di Kota Malang pun terus meningkat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisiknya. Selain meningkatnya pembangunan di segala bidang, penduduk Kota Malang pun semakin meningkat setiap tahunnya sehingga Kota Malang menjadi kota yang padat penduduknya.

Meningkatnya pembangunan di Kota Malang menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Malang, sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administrasinya. Agar pembangunan di Kota Malang dapat terus berjalan, pemerintah merasa perlu mengubah batas wilayah Kota Malang dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Malang untuk keperluan perluasan wilayah Kota Malang. Melihat alasan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Dalam peraturan tersebut, batas wilayah Kota Malang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Malang yang salah satunya adalah Desa Tunggul Wulung. Desa Tunggul Wulung yang dulunya termasuk wilayah Kecamatan Karang Ploso, sejak tahun 1999 telah berubah status administratif menjadi Kelurahan Tunggul Wulung yang kita kenal sekarang.

2. Kondisi Geografis Kelurahan Tunggul Wulung

Kelurahan Tunggul Wulung terletak di perbatasan Kota Malang yang memisahkan Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Kelurahan Tunggul Wulung terdiri atas 6 RW dan 49 RT dengan jumlah penduduk yang di dapat dari monografi Kelurahan Tunggul Wulung semester I tahun 2011 adalah 6.354 jiwa.

Sedangkan batas-batas administratif Kelurahan Tunggul Wulung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tegalondo dan Kelurahan Tasikmadu

Sebelah Selatan : Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu

Sebelah Barat : Kelurahan Tlogomas

Sebelah Timur : Kelurahan Tunjungsekar

3. Keadaan Penduduk

Keadaan dan jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Tunggul Wulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, didasarkan pada keadaan penduduk hingga

tahun anggaran 2011 berjumlah 6.354 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.061 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.293 jiwa.

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kelurahan Tunggul Wulung Kota Malang menurut usianya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah
1	2	3
1.	0 - 6 tahun	708 orang
2.	6 - 15 tahun	1.862 orang
3.	15 - 60 tahun	2.713 orang
4.	≥ 60 tahun	1.071 orang
Jumlah		6.354 orang

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Tunggul Wulung Semester I Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tunggul Wulung menurut kelompok usia adalah yang berusia 0-6 tahun berjumlah 708 orang, usia 6-15 tahun berjumlah 1.862 orang, usia 15-60 tahun berjumlah 2.713 orang, sedangkan usia 60 tahun keatas berjumlah 1.071 orang. Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di usia 15-60 tahun.

Selain data jumlah penduduk menurut kelompok usia juga ada data jumlah penduduk menurut jenis agama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Agama

No.	Agama	Jumlah
1	2	3
1.	Islam	5.829 Orang
2.	Khatolik	135 Orang
3.	Protestan	355 Orang
4.	Hindu	20 Orang
5.	Budha	15 Orang
Jumlah		6.354 orang

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Tunggul Wulung Semester I Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung mayoritas memeluk Agama Islam yang mana berjumlah 5.829 orang, 135 orang menganut Agama Khatolik, 355 orang menganut Agama Protestan, 20 orang menganut Agama Hindu, dan 15 orang menganut Agama Budha.

Selain jumlah penduduk menurut usia dan jenis agama, ada juga data mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, yaitu :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	Belum Sekolah	682 Orang
2.	Tidak Tamat SD	120 Orang
3.	Tamat SD	462 Orang
4.	Tamat SMP / sederajat	2.243 Orang
5.	Tamat SMA / sederajat	1.971 Orang
6.	Tamat Akademi	475 Orang
7.	Tamat Perguruan Tinggi	401 Orang
Jumlah		6.354 orang

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Tunggul Wulung Semester I Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi pendidikan masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung yang berpendidikan setingkat SMP adalah yang paling dominan yaitu sebesar 2.243 orang. Selain jumlah untuk tingkat SMP, ada juga data masyarakat yang belum sekolah yaitu 682 orang, masyarakat yang tamat SD berjumlah 462 orang, tamat SMA berjumlah 1.971 orang, tamat akademi berjumlah 475 orang, dan jumlah paling sedikit adalah jumlah masyarakat yang tidak tamat SD, yaitu 120 orang.

4. Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Tunggul Wulung

Sementara itu, untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung dalam memenuhi kebutuhannya dapat dilihat dari struktur mata pencarian dan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung memiliki mata pencarian yang beragam. Sebagian besar keadaan sosial penduduk di wilayah Kelurahan Tunggul Wulung adalah masyarakat tingkat menengah kebawah dimana sebagian besar penduduk bekerja disektor bangunan, pertanian, swasta, perdagangan, dan lain-lain. Dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Daftar Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Tunggul Wulung

No.	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
1	2	3
1.	Pegawai Negeri Sipil	190 Orang
2.	Pengrajin	78 Orang
3.	Pedagang	295 Orang
4.	Penjahit	45 Orang
5.	Tukang Kayu	220 Orang
6.	Tukang Batu	112 Orang
7.	Peternak	105 Orang
8.	Montir	6 Orang
9.	Dokter	15 Orang

1	2	3
10.	Pengemudi Becak	1 Orang
11.	TNI / POLRI	24 Orang
12.	Pengusaha	35 Orang
13.	Pensiunan ABRI	12 Orang
	Jumlah	1.138 Orang

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Tunggul Wulung Semester I Tahun 2011

5. Kondisi Sosiokultural Kelurahan Tunggul Wulung

Dalam upaya untuk mendukung pembangunan kelurahan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu peranan pendidikan sangat penting didalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh manusia yang diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung sangat membutuhkan pendidikan dan sarana pendidikan yang sesuai. Sebagai salah satu wilayah yang letaknya dapat dikatakan berada di wilayah paling ujung Kota Malang, maka sarana pendidikan yang dimiliki Kelurahan Tunggul Wulung haruslah dapat menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Hal ini juga didorong oleh tekad pemerintah yang berusaha memberantas buta huruf bagi masyarakat dan meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Usaha ini dilakukan dengan suatu kerja keras dan partisipasi dari semua pihak. Sarana pendidikan dibangun di berbagai tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh warga masyarakat.

Tabel di bawah akan menunjukkan jumlah sarana pendidikan yang dimiliki Kelurahan Tunggul Wulung.

Tabel 5

Daftar Sarana pendidikan Kelurahan Tunggul Wulung

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	TK	3 Unit
2.	SD	5 Unit
3.	SMP	-
4.	SMA	-
5.	Perguruan Tinggi	1 Unit
6.	Pondok Pesantren	2 Unit

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Tunggul Wulung Semester I Tahun 2011

6. Visi, Misi, dan Tujuan Kelurahan Tunggul Wulung

a. Visi

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh pemerintah maupun masyarakat tunggul wulung dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu mengerakkan seluruh sumberdaya yang di miliki menuju apa yang ingin diwujudkan. Visinya yaitu : “ **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan aman, bersih, harmonis, dengan senantiasa tetap menghargai kearifan budaya lokal** ”.

b. Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah kelurahan tunggul wulung telah menyusun tiga misi sebagai berikut:

- (a) Terciptanya tatanan yang teratur, tersistem, dan harmonis
- (b) Terciptanya karakteristik tunggul wulung
- (c) Terciptanya keserasian lingkungan / alam

c. Tujuan

Setelah dijabarkan tentang visi dan misi Kelurahan Tunggul Wulung, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kelurahan Tunggul Wulung adalah **“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan aman, bersih, harmonis, dengan senantiasa tetap menghargai kearifan budaya lokal sehingga dapat menciptakan tatanan yang teratur dan harmonis, menciptakan keserasian lingkungan, dan menciptakan karakterisitik Tunggul Wulung.”**

7. Pemerintah Kelurahan Tunggul Wulung

Untuk dapat melaksanakan setiap aktifitas yang berhubungan dengan pembangunan kelurahan dan masyarakatnya diperlukan adanya perangkat yang

mengurusi dan mengkoordinasikan semua kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu harus ada perangkat kelurahan yang bertugas menangani urusan kelurahan.

Kelurahan Tunggul Wulung dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang bertugas untuk mengatur dan memimpin segala sesuatu yang berhubungan dengan Kelurahan Tunggul Wulung. Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, Kepala Kelurahan dibantu oleh seorang Sekretaris Kelurahan. Sekretaris kelurahan bertugas melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, Kepala Kelurahan juga dibantu oleh beberapa seksi yang masuk dalam perangkat kelurahan. Sesuai Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2008 Tentang Uraian Tupoksi dan Tata Kerja Kelurahan, perangkat kelurahan lainnya adalah Seksi Pemerintahan yang tugasnya menangani segala macam yang berhubungan dengan pemerintahan kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, termasuk membentuk LPMK. Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan, seperti pengurusan KTP dan lain-lain.

Adapun susunan perangkat Pemerintah Kelurahan Tunggul Wulung dapat dilihat pada tabel struktur organisasi berikut :

Tabel 6

Perangkat Pemerintahan Kelurahan Tunggul Wulung

No	Perangkat Pemerintahan	Nama / tahun 2011	Nama / tahun 2012
1	2	3	4
1.	Kepala Kelurahan	Rendi Triatmojo, SE	Rendi Triatmojo, SE
2.	Sekretaris Kelurahan	Jayus, S.Pd	Jayus, S.Pd
3.	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	H. Subhan Effendi	H. Subhan Effendi
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Hj. Safrida	Hj. Safrida
5.	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Edy Siswanto	Sholeh
6.	Seksi Pelayanan Umum	Fredik R. Openg	Yunus Yasin, SH
7.	Staf	Wartono	Wartono
8.	Staf	Nurul Aini	Nurul Aini
9.	Staf	Riyanto	Riyanto

Sumber : Dokumen Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011 / 2012

B. Penyajian Data

1. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa LPMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan suatu wadah aspirasi dan suatu lembaga yang bergerak di bidang pembangunan kelurahan, baik fisik maupun non fisik. Dalam hubungannya dengan pembangunan kelurahan, maka hal ini berkaitan erat dengan garis tindakan yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 menjadi sumber hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya dalam pembangunan. Karena dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001, dijelaskan apa saja tugas pokok dan bagaimanakah struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Berbicara mengenai tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Mengawasi pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan

Selain menjelaskan tentang tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 pasal 9 disebutkan tentang susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang terdiri dari :

1. Ketua LPMK
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi-seksi

Pada tabel 7 di bawah ini adalah susunan organisasi LPMK Kelurahan Tunggul Wulung.

Tabel 7
Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No.	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Ketua LPMK	Kholik Nuriadi, Amd. Kop
2.	Wakil Ketua I	Ir. Sahrwan
3.	Wakil Ketua II	Nicolas Sugeng Siswandi
4.	Sekretaris I	Sukartono
5.	Sekretaris II	Drs. Edi Hermanto
6.	Bendahara I	I Nengah Widhiada

1	2	3
7.	Bendahara II	Bambang Prayono
8.	Seksi Kamtibnas	Suyatno Suharjo
9.	Seksi Pembangunan	Darmaji Mulyono Hariono
10.	Seksi Swadaya dan Tata kelola Aset	Nurali Juki Ismail
11.	Seksi Pembinaan Agama	M. yasin Nurchozin Purnomo
12.	Seksi Pendidikan dan Latihan	Kuswinaryatini U'uk
13.	Seksi Kesehatan Masyarakat	Nurhayati Wiwit
14.	Seksi Pemberdayaan Keluarga	Listyonongsih Sulikati
15.	Seksi Pemuda Olahraga dan Seni	Syamsul Utomo Dedy Kurniawan Didin Husain
16.	Seksi Budaya dan Adat	Toha Mukali
17.	Seksi Pertamanan dan Penghijauan	Kasiyan Suharto

Sumber : Dokumen Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2009-2011

Berdasarkan tugas pokok dan susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pelaksanaannya di Kelurahan Tunggul Wulung memiliki sedikit perbedaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kolik, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung bahwa :

Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) secara formal sama dengan kelurahan-kelurahan lainnya yang sesuai Peraturan daerah yang berlaku. Tetapi pada Kelurahan Tunggul Wulung, kami menggunakan susunan organisasi secara adat yang berupa

paguyuban dan memiliki nama “Paguyuban Tunggul Wulung Toto, Titi, Tentrem”. Paguyuban ini tetap bergerak di bidang pembangunan dan berada di bawah naungan kelurahan. Susunan dalam paguyuban pun berbeda dengan susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada umumnya. Dalam paguyuban ini, susunan organisasi terdiri dari :

- a. Ketua Paguyuban
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Kepala Bidang Sosial
- e. Kepala Bidang Budaya
- f. Kepala Bidang Ekonomi
- g. Kepala Unit di Masing-masing Bidang

(Wawancara dilakukan tanggal 10 November 2011 pk. 10.00 WIB)

Dengan melihat pernyataan yang dibuat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Tunggul Wulung masih sangat menjunjung tinggi budaya dan adat yang mereka miliki dalam melaksanakan pembangunan.

Sesuai susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Kelurahan Tunggul Wulung memiliki tiga bidang pembangunan, yaitu : **Pertama**, Bidang Sosial. Bapak Jaedi selaku Ketua Bidang Sosial, menjelaskan bahwa :

Bidang sosial ini menangani masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan Kelurahan Tunggul Wulung. Kami telah melaksanakan beberapa program. Salah satunya adalah membagikan bahan makanan pokok kepada masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung yang kami rasa memiliki kondisi yang kurang mampu. Dari yang semula kami hanya membagikan 10 kilogram beras setiap bulannya, sekarang menjadi 5 kuintal beras setiap bulannya. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan masyarakat Tunggul Wulung yang memiliki mata pencaharian di bidang kesehatan (dokter maupun bidan) untuk mengadakan pengobatan murah bagi para masyarakat Tunggul Wulung, karena masih banyak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

(Wawancara dilakukan tanggal 11 November 2011 pk. 10.00 WIB)

Selain bidang sosial, yang **Kedua**, adalah Bidang Ekonomi. Bapak Sugeng, selaku Ketua Bidang Ekonomi menjelaskan bahwa :

Bidang ekonomi yang kami lakukan telah banyak membantu usaha masyarakat, salah satunya dalam usaha Jamu Gendong Keliling. Karena selain banyak masyarakat yang menggantungkan diri pada usaha ini, jamu dari Tunggul Wulung terkenal memiliki ciri khas dan rasa tersendiri. Selain membantu usaha masyarakat melalui pemberian perlengkapan jamu, bidang ekonomi juga membantu masyarakat melalui pengadaan budidaya hewan ternak, dari sapi hingga ikan dan itik.
(Wawancara dilakukan tanggal 15 November 2011 pk. 13.00 WIB)

Sedangkan bidang yang **Ketiga** adalah program budaya yang menangani masalah kebudayaan yang ada di lingkungan Kelurahan Tunggul Wulung. Bapak Rohis, selaku Ketua Bidang Budaya menjelaskan bahwa :

Pada bidang budaya ini, kami telah melaksanakan berbagai program yang mengedepankan pengembangan seni dan budaya yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung. Salah satu program budaya yang rutin kami jalankan adalah mengadakan acara ‘ bersih desa ’ yang kami laksanakan setiap 1 Muharram atau 1 Suro. Selain budaya ‘ bersih desa ’, kami juga mengembangkan kesenian ‘ kuda lumping ’ yang ada di Tunggul Wulung. Karena meskipun kami sudah menjadi sebuah kelurahan, seni dan kebudayaan yang kami miliki tetap kami jaga keberadaannya.
(Wawancara dilakukan tanggal 11 November 2011 pk. 13.00 WIB)

Dari penjelasan tentang bidang-bidang yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung, dapat diketahui bahwa bidang-bidang yang di jalankan oleh LPMK sangat memberikan dukungan untuk masyarakatnya. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya program yang memudahkan masyarakat untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh LPMK.

a. Hasil Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Dicanangkan Sebelumnya

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, maupun aspek budaya. Dalam pembangunan kelurahan, perencanaan pembangunan diputuskan melalui Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan). Perencanaan merupakan penentuan garis tindakan yang dipandang tepat dan menjamin berhasilnya suatu bidang usaha atau beberapa bidang usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan, maka hal ini berkaitan erat dengan penentuan garis tindakan yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses suatu perencanaan pembangunan hingga terwujudnya suatu pembangunan melalui LPMK harus melalui beberapa tahap. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kolik, yaitu :

Tahap pertama, masing-masing RT/RW yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung mengajukan usulannya masing-masing yang diwakili oleh para ketua RW masing-masing, usulan tersebut kemudian diajukan kepada Ketua LPMK. Kemudian Ketua LPMK bersama Kepala Kelurahan dan wakil-wakil masyarakat akan mengadakan musyawarah untuk menentukan dan memilih usulan mana yang harus diutamakan dan paling penting. Musyawarah ini yang disebut Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan). Setelah program pembangunan pada Musrenbangkel di putuskan, maka akan diajukan ke tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan, dilakukan lagi musyawarah untuk mempersempit ruang lingkup usulan pembangunan di kelurahan. Setelah tingkat kecamatan, usulan tersebut di bahas lebih lanjut di tingkat kota yang nantinya akan menghasilkan program-program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh LPMK.

(Wawancara dilakukan tanggal 29 November 2011 pk. 12.00 WIB)

Setelah melalui beberapa tahapan diatas, akhirnya diputuskan proyek atau program apa saja yang telah disetujui oleh pihak kecamatan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan boleh direalisasikan di Kelurahan Tunggul Wulung. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ini masyarakat dilibatkan secara langsung dan aktif. Pelaksanaan pembangunan ini merupakan tahap terakhir dari perencanaan pembangunan. jika pelaksanaan ini sudah berjalan lancar maka pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung sudah bisa dikatakan berhasil. Keberhasilan pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011 dapat dilihat dari tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Daftar Program Pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011

No.	Jenis dan Nama Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
KEGIATAN FISIK				
1.	Pembuatan kolam ikan	3m x 500m	3m x 500m	Tercapai
2.	Lantai keramik gedung serbaguna	6m x 45m	-	Belum tercapai
3.	Lanjutan atap pendopo seni	16.5m x 16.5m	16.5m x 16.5m	Tercapai
4.	Lantai keramik pendopo seni	16.5m x 16.5m	16.5m x 16.5m	Tercapai
5.	Pavingisasi halaman pendopo seni	26m x 34.5m	26m x 34.5m	Tercapai
6.	Saluran air pendopo seni	0.5m x 69m	0.5m x 69m	Tercapai
7.	Pavingisasi jalan masuk stadion / gedung serbaguna	6m x 45m	6m x 45m	Tercapai

1	2	3	4	5
8.	Pembuatan pos keamanan kolam ikan	3m x 7m	3m x 7m	Tercapai
9.	Renovasi pasar simpang limo	17m x 20m	17m x 20m	Tercapai
10.	Pembuatan tugu batas wilayah kelurahan	1 buah	1 buah	Tercapai
11.	Pavingisasi pujasera	4m x 350m	4m x 350m	Tercapai
12.	Pembuatan tenda warung pujasera	2 buah	-	Belum tercapai
13.	Pavingisasi jalan setapak kampung	500m	500m	Tercapai
14.	Pavingisasi jalan	72m	72m	Tercapai
15.	MCK	1 unit	1 unit	Tercapai
16.	Pagar pembatas sungai	15m	15m	Tercapai
17.	Pavingisasi jalan	420m	420m	Tercapai
18.	Pembuatan papan promosi umum	3 buah	3 buah	Tercapai
19.	Plengsengan sungai	500m	500m	Tercapai
20.	Pembenahan atap 2 (dua) pos kamling	2m x 3m	-	Belum tercapai
KEGIATAN NON FISIK				
1.	Pembinaan dasawisma dan alat penunjang	1 paket	-	Belum tercapai
2.	Pembinaan posyandu lansia dan alat penunjang	1 paket	1 paket	Tercapai
3.	Pembinaan dan peningkatan keg. Posyandu balita	1 paket	1 paket	Tercapai
4.	Pembinaan dan peningkatan kegiatan pos paud	1 paket	1 paket	Tercapai
5.	Peningkatan pembuatan komposing dan alat penunjang	1 paket	-	Belum tercapai

1	2	3	4	5
6.	Pembinaan dan peningkatan keg. Karang taruna	1 paket	1 paket	Tercapai
7.	Peningkatan kualitas pedagang keliling (tahu, dawet)	20 paket	20 paket	Tercapai
8.	Pembinaan pedagang keliling jamu gendong	36 paket	36 paket	Tercapai
9.	Pembuatan dokumen profil kelurahan	1 paket	-	Belum tercapai
10.	Peningkatan keg. Seni dan budaya kuda lumping	4 paket	4 paket	Tercapai
11.	Pemberdayaan usaha sentra ekonomi masyarakat	1 paket	1 paket	Tercapai
12.	Pembinaan dan peningkatan kegiatan paguyuban	2 paket	2 paket	Tercapai

Sumber : Dokumen Rencana Definitif Kegiatan Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011

Dari tabel program pembangunan di atas, program yang telah tercapai sejumlah 26 dari total 32 program. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kolik, selaku Ketua LPMK Kelurahan Tunggul Wulung, bahwa :

Sejak adanya LPMK hingga sekarang, sudah banyak pembangunan secara fisik yang telah kami lakukan, contohnya pavingisasi jalan, pembuatan jembatan, pembuatan kolam ikan, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan pendopo seni, dan lain-lain. Di tahun 2011 ini, program pembangunan yang telah berjalan sebanyak 26 program dari 32 target program pembangunan yang kami tentukan.

(Wawancara dilakukan tanggal 29 November 2011 pk. 12.00 WIB)

Selain penjelasan dari Bapak Kolik, Bapak Jaedi juga menambahkan bahwa :

Pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011 sudah mencapai 81,25% dari perencanaan. Memang ada beberapa program kegiatan yang belum terlaksana, tapi sejauh ini sudah banyak program-program yang telah berjalan, baik program pembangunan fisik atau infrastruktur di tiga bidang,

maupun pembangunan non fisik seperti pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.

(Wawancara dilakukan tanggal 30 November 2011 pkl. 10.00 WIB)

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa Kelurahan Tunggul Wulung telah banyak melaksanakan pembangunan secara fisik. Hal ini dapat dilihat dari bermacam-macamnya pembangunan fisik yang telah dilakukan, seperti pembangunan gedung serbaguna yang menjadi sarana olahraga maupun sarana untuk acara-acara besar. Selain pembangunan gedung serbaguna, LPMK telah melaksanakan pembangunan gedung pendopo seni yang dapat digunakan untuk pelaksanaan berbagai acara seni dan budaya yang digelar di Kelurahan Tunggul Wulung, seperti acara ‘bersih desa’ maupun acara seni lainnya.

Selain pembangunan fisik, pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung juga dilakukan secara non fisik. Pembangunan Non Fisik dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang biasanya dilakukan melalui pelatihan skill/peningkatan life skill, seminar, sarasehan dan lain-lain. Bapak Kolik menjelaskan bahwa :

Pembangunan non fisik di Kelurahan Tunggul Wulung ini kami lakukan melalui pelatihan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Pelatihan yang kami lakukan tahun 2011 ini adalah pelatihan pembinaan keluarga balita, pelatihan pembinaan pada pedagang keliling jamu gendong maupun ketrampilan pembuatan kompos. Sedangkan pengadaan sarana dan prasarana yang kami lakukan adalah pemberian sarana dan prasarana untuk pertemuan paguyuban yang setiap bulan kami adakan. Kemudian pemberian sarana dan prasarana pasar, maupun pemberian sarana dan prasarana pada bidang seni dan budaya.

(Wawancara dilakukan tanggal 9 Desember 2011 pkl. 13.30 WIB)

Selain penjelasan di atas, Bapak Sugeng juga menambahkan penjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan non fisik di kelurahan Tunggul Wulung bahwa :

Pelatihan maupun pembinaan yang dilakukan di Kelurahan Tunggul Wulung sebagian besar dalam bidang peningkatan ekonomi. Karena masyarakat Tunggul Wulung sebagian besar menggantungkan dirinya dalam usaha kecil, seperti jamu gendong, keripik singkong, tahu, dan lain-lain. Oleh karena itu, LPMK mengedepankan pemberian pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat di bidang usaha kecil agar dapat meningkatkan usaha mereka. Tapi selain pembinaan dan pelatihan pada bidang ekonomi, ada juga pelatihan dan pembinaan pada bidang sosial, melalui pembinaan ibu-ibu PKK dalam meningkatkan ketrampilan dan pelayanan mereka kepada masyarakat, seperti pelatihan ketrampilan tentang paud, posyandu balita, dan lain-lain.

(Wawancara dilakukan tanggal 21 Desember 2011 pk. 14.00 WIB)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan non fisik di Kelurahan Tunggul Wulung dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan, pembinaan, maupun melalui pemberian sarana dan prasarana di berbagai kegiatan. Pelatihan yang dilakukan kebanyakan mengenai pelatihan peningkatan ketrampilan masyarakat, seperti pelatihan ketrampilan paud maupun posyandu. Selain pelatihan ketrampilan, pembangunan non fisik yang dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana ' pasar simpang limo ', pengadaan sarana dan prasarana kesenian ' kuda lumping ', dan pengadaan sarana dan prasarana untuk usaha kecil masyarakat yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung.

b. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam pembangunan merupakan masyarakat pada lapisan terendah dalam pemerintahan yaitu masyarakat ditingkat kelurahan. Masyarakat kelurahan tersebut merupakan setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat tinggal di dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan. Berdasarkan tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan terutama dalam penentuan arah atau strategi pembangunan masyarakat kelurahan yang

berpartisipasi dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat yang terlibat langsung maupun masyarakat yang terlibat secara tidak langsung.

Masyarakat yang terlibat langsung, yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan secara langsung, melalui Musrenbangkel maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek. Sedangkan masyarakat yang terlibat secara tidak langsung, yaitu masyarakat yang memberikan pengaruhnya melalui perantara yang dapat menyampaikan aspirasinya, seperti pemberian sumbangan secara materiil demi kelancaran pembangunan.

Dari penjelasan mengenai jenis partisipasi di atas, partisipasi masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung dalam pembangunan dapat terlihat dari penjelasan di bawah ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kolik, Ketua LPMK Kelurahan Tunggul Wulung :

Pada pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung, partisipasi masyarakat terwujud dalam berbagai aspek. Partisipasi melalui pendapat, masyarakat terlibat dalam pemberian usulan maupun saran pembangunan pada saat musyawarah RT/RW mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Tunggul Wulung, juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbangkel. Partisipasi melalui materiil, masyarakat juga terlibat dalam partisipasi materiil ketika masyarakat memberikan sumbangan berupa materiil (dana) untuk membantu pembangunan kelurahan. Sebagai contoh, pembangunan kolam ikan di Jl. Akordion sebagian besar juga merupakan sumbangan dari masyarakat. Dan partisipasi tenaga, dalam beberapa pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung dibantu oleh beberapa tenaga dari masyarakatnya, contohnya adalah pavingisasi jalan, pembuatan pendopo seni, pembuatan gapura, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat Tunggul Wulung berprofesi sebagai tukang batu (kuli) sehingga kami dapat memberdayakan mereka dengan menggunakan tenaga mereka sebagai pelaksana pembangunan.
(Wawancara dilakukan tanggal 26 Desember 2011 pk1. 10.30 WIB)

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa agar program pembangunan dapat berjalan lancar, perlu mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat. Masyarakat jangan selalu dijadikan sebagai obyek dari pembangunan, namun sebaliknya, masyarakat harus dijadikan sebagai subyek, artinya turut pula merencanakan kegiatan pembangunan. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan melalui kelembagaan, yaitu dapat dilihat mulai berperannya LPMK turut menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan kelurahan.

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, Kelurahan Tunggul Wulung tidak hanya mengikutsertakan masyarakatnya dalam pembangunan, tetapi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh LPMK maupun oleh kelurahan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rohis, bahwa :

Keikutsertaan masyarakat Tunggul Wulung tidak hanya dalam pembangunan saja. Jika di Tunggul Wulung ada kegiatan yang mengharuskan masyarakat berpartisipasi, maka masyarakat akan ikut berpartisipasi. Seperti dalam kegiatan 'bersih desa' yang dilakukan setiap satu tahun sekali, antusias masyarakat sangat tinggi dalam meramalkan acara tersebut. Selain itu ketika ada acara kerja bakti atau acara-acara lainnya, kesadaran masyarakat juga sangat tinggi dalam turut serta.
(Wawancara dilakukan tanggal 26 Desember 2011 pk. 12.00 WIB)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung sangat tinggi dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam proses pembangunan saja, tetapi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Tunggul Wulung. Karena masyarakat Tunggul Wulung masih memiliki ke-gotong royongan yang sangat tinggi.

c. Menumbuhkembangkan Masyarakat Melalui Pelatihan Ketrampilan

Pembangunan pada dasarnya ada dua jenis yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik sendiri dapat diterjemahkan berbagai macam, misalnya pembangunan infrastruktur, industri, pertambangan, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendirian sekolah diberbagai tingkatan, pengembangan IPTEK dengan skala prioritas, pelatihan skill/peningkatan life skill, seminar, sarasehan dll. Semuanya itu bertujuan untuk membangun modal manusia (*building human capital*) atau membangun kekuatan otak (*Building Brain Power*).

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan non fisik yang dilakukan di Kelurahan Tunggul Wulung berupa peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan di berbagai bidang. Keadaan geografis Kelurahan Tunggul Wulung yang sebagian besar masih berupa persawahan dan kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah kebawah menjadi alasan diberikannya pelatihan dan pembinaan oleh LPMK kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Jaedi, bahwa :

Tahun 2011 ini kami banyak mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi pedagang serta bagi ibu-ibu PKK agar meningkatkan usaha dan pelayanan mereka kepada masyarakat. Beberapa pelatihan yang kami adakan adalah :

1. Bidang ekonomi
 - a. Peningkatan kualitas pedagang keliling (tahu, dawet)
 - b. Pembinaan pedagang keliling jamu gendong
 - c. Pemberdayaan usaha sentra ekonomi masyarakat

Pada bidang ini, kami memberikan sejumlah sarana dan prasarana kepada pedagang agar dapat lebih meningkatkan usaha mereka.

2. PKK

- a. Pembinaan dasawisma
- b. Pembinaan posyandu lansia
- c. Pembinaan dan peningkatan kegiatan posyandu balita
- d. Pembinaan dan peningkatan kegiatan pos paud

Sedangkan pada kegiatan PKK, selain kami memberikan bantuan sarana dan prasara pada berbagai kegiatan, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan agar masyarakat lebih memahami bagaimana prosedur pada kegiatan PKK.

(Wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2011 pkl. 10.00 WIB)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sasaran utama pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan Tunggul Wulung adalah masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan ibu rumah tangga. Tujuannya adanya pelatihan dan pembinaan di atas adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain dari penjelasan Bapak Jaedi di atas, ada juga penjelasan dari Bapak Kolik sebagai berikut :

Pembinaan dan pelatihan yang kami berikan kepada masyarakat, tidak hanya berupa pemberian pelatihan dan pembinaan pada suatu program tertentu saja, tetapi juga pemberian bantuan sarana dan prasarana pada kegiatan-kegiatan maupun usaha-usaha masyarakat yang menjadi prioritas.
(Wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2011 pkl. 13.00 WIB)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pembangunan, keberhasilan tidak hanya dilihat dari meningkatnya fasilitas ataupun infrastruktur yang ada di suatu wilayah, tetapi juga pada dilihat pada peningkatan sumber daya manusianya. Karena dalam pembangunan, sumber daya manusia merupakan satu hal terpenting yang tidak hanya berperan sebagai pelaku pembangunan tetapi juga berperan sebagai pengguna pembangunan.

d. Tanggapan Masyarakat Atas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Tunggul Wulung sangatlah beragam. Tentu dalam menanggapi pembangunan, tidak semua masyarakat memberikan tanggapan yang positif. Ada beragam tanggapan masyarakat mengenai kinerja LPMK. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Tunggul Wulung itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dayat, selaku salah satu Penanggung Jawab Kesenian Kuda Lumping di Kelurahan Tunggul Wulung, bahwa :

Menurut saya, kinerja LPMK sejauh ini sudah cukup baik dan memuaskan. LPMK telah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku seni ‘ kuda lumping ’ sehingga kesenian ini dapat tetap hidup dan lebih berkembang. Selain itu kami telah diberikan fasilitas khusus untuk pengembangan kesenian ‘ kuda lumping ’ melalui dibangunnya pendopo seni.

(Wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2011 pk. 10.00 WIB)

Selain Bapak Dayat yang memberikan tanggapan mengenai pembangunan, ada juga Ibu Nur Amilah, salah satu masyarakat yang memiliki profesi sebagai pedagang keliling jamu gendong yang berpendapat bahwa :

LPMK banyak membantu kami, para pedagang jamu gendong. Kami diberi bantuan berupa peralatan pembuatan jamu. Selain itu, kami merasa terbantu dengan adanya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan keadaan ekonomi kami. Saya rasa, kinerja LPMK sudah cukup memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saran saya, LPMK dapat memberikan bantuan lagi untuk pedagang jamu gendong dalam hal pemasarannya.

(Wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2011 pk. 15.30 WIB)

Selain Bapak Dayat dan Ibu Nur Amilah yang memberikan tanggapan positif atas kinerja LPMK, ada juga beberapa pemuda yang masih kurang memahami seperti apa kinerja LPMK. Seperti yang dijelaskan oleh Saudari Yunita :

Saya kurang paham apa sebenarnya LPMK itu, yang saya tahu keadaan Tunggal Wulung sekarang semakin baik, terutama setelah dibangunnya fasilitas-fasilitas umum seperti gedung olahraga, puskesmas, dan lain-lain. Saran saya, ditambah lagi fasilitas-fasilitas umumnya. Terutama fasilitas rekreasi.

(Wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2011 pkl. 12.00 WIB)

Dari beberapa tanggapan positif dan saran yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat Kelurahan Tunggal Wulung di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat merasa terbantu dengan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMK, terutama dalam pembangunan fasilitas umumnya.

Selain tanggapan-tanggapan masyarakat di atas, ada juga beberapa tanggapan negatif dari beberapa masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Jumadi, bahwa :

Saya kurang tahu apa itu LPMK, tapi sebagai petani, saya tidak merasa terbantu. Sampai sekarang tidak ada bantuan alat-alat untuk para petani di daerah ini. Kami masih menggunakan alat-alat tradisional dalam mengolah sawah yang kami miliki. Harapan saya, agar LPMK lebih memperhatikan kondisi kami para petani, agar kami sedikit terbantu.

(Wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2011 pkl. 13.30 WIB)

Selain Bapak Jumadi yang memberikan tanggapan negatif terhadap kinerja LPMK, ada juga Saudara Saiqul yang menyatakan bahwa :

Saya tidak tahu apa itu LPMK, tapi menurut saya mereka masih kurang memperhatikan para pemuda di kampung ini. Karena yang saya tahu, disini masih banyak pemuda pemudi yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Mungkin hal itu lebih diperhatikan lagi.

(Wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2011 pk. 14.30 WIB)

Dari beberapa tanggapan di atas, baik yang positif maupun negatif, dapat dilihat bahwa masyarakat cukup merasa puas dengan kinerja LPMK dalam membangun Tunggul Wulung. Selain memberikan tanggapan, mereka juga memberikan saran dan harapan mereka kepada LPMK agar lebih meningkatkan kinerjanya, menambah fasilitas umum lagi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, dan lebih memperhatikan para pemuda pemudi yang masih belum memiliki lapangan pekerjaan.

Tanggapan-tanggapan masyarakat di atas, menunjukkan bahwa masyarakat juga dapat bertindak sebagai pengawas dan memperhatikan pembangunan yang dilakukan oleh LPMK, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari tanggapan-tanggapan di atas, LPMK dapat menjadikannya sebagai acuan dalam meningkatkan kinerjanya untuk lebih memperhatikan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan

Dalam menjalankan program-program yang ada, tentu saja LPMK tidak jauh dari hal-hal yang menjadi pendukung maupun hal-hal yang menjadi penghambat kinerjanya baik dari dalam maupun dari luar lembaga. Di bawah ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja LPMK.

a. Faktor Pendukung

Suatu perencanaan dibuat untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dan sesuai rencana. Dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang menjadi faktor utamanya adalah manusia sebagai pelaku dari perencanaan dan pelaksanaan tersebut. Selain faktor manusia, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu pembangunan itu berjalan, yaitu :

(1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pembangunan partisipatif, sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat, menjadi tokoh utama dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pada pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Tunggul Wulung, masyarakat atau SDM benar-benar menjadi faktor pendukung keberhasilan pembangunan. Terutama masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan pembangunan wilayahnya. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan LPMK, Musrenbangkel, maupun pada pembangunan proyek-proyeknya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sugeng, bahwa :

Tidak sedikit masyarakat yang membantu dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Jika dalam perencanaan pembangunan, masyarakat ikut serta dalam Musrenbangkel, maka dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat ikut serta dalam membantu proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh LPMK.

(Wawancara dilakukan tanggal 5 Januari 2012 pkl. 13.00 WIB)

Perencanaan pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung dinilai telah berhasil, hal ini tidak lepas dari tingginya SDM yang dimiliki

masyarakatnya yang berorientasi jauh kedepan tentang pembangunan yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung. Pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun selalu mereka utarakan untuk perbaikan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kolik, bahwa :

Meskipun secara administratif, wilayah kami berupa ‘ kota ’, pola kesosial masyarakatan kami masih tetap ‘ desa ’ yang masih menjunjung tinggi gotong royong dan nilai kebudayaan yang kami miliki.

(Wawancara dilakukan tanggal 5 Januari 2012 pkl. 15.00 WIB)

(2) Keuangan atau Dana

Dalam suatu pembangunan, tentu tidak lepas dari faktor yang satu ini yaitu pendanaan. Suatu pembangunan dapat terlaksana dengan lancar jika faktor pendanaan juga ditunjang. Dalam pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung, faktor pendanaan berasal dari beberapa sumber, yaitu :

(a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD Pemerintah Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Pendanaan ini berupa Dana Hibah yang diberikan secara langsung oleh Pemerintah Kota kepada LPMK untuk melakukan pembangunan di setiap kelurahan. Pada kegiatan LPMK tahun 2011, dana APBD yang diberikan kepada LMPK

Kelurahan Tunggul Wulung adalah sebesar Rp 250 juta. (*Data Rencana Definitif Kegiatan LPMK Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011*)

(b) Dana Yang Tidak Mengikat (Swadaya Masyarakat)

Dana ini berasal dari swadaya masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung sendiri yang bersifat sukarela. Jenis dan macam sumbangan yang diberikan dari swadaya masyarakat sangat beragam, ada yang berupa sumbangan uang, material, maupun tenaga. Dalam memberikan sumbangan ini ada yang melalui sistem kelompok atau hasil pengumpulan dari beberapa warga maupun melalui sistem perorangan. Dalam kegiatan LPMK tahun 2011 ini, dana yang di dapat dari swadaya masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung adalah sebesar Rp 19.500.000. (*Data Rencana Definitif Kegiatan LPMK Kelurahan Tunggul Wulung Tahun 2011*)

Dana dan bantuan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat mendukung kelancaran serta terealisasinya pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung. Pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung tidak akan berjalan apabila hanya mengandalkan Sumber Daya Manusia saja, tetapi juga harus didukung dengan dana dan bantuan dari semua pihak.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung, juga tidak lepas dari kendala-kendala atau hambatan-

hambatan yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa faktor penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan, yaitu :

(1) Tingkat pendidikan yang rendah

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi suatu kendala dalam pembangunan karena akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang dihasilkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rohis sebagai berikut :

Masyarakat di Tunggul Wulung ini yang memiliki tingkat pendidikan SMA / di atasnya masih sangat minim jika di bandingkan dengan jumlah masyarakat yang tidak sekolah hingga sekolah setingkat SMP. Dengan tingkat pendidikan yang masih bisa di bilang rendah, pola pikir dan sikap masyarakat bisa di bilang berbeda dengan masyarakat lain. Apalagi kondisi sosial Tunggul Wulung yang dulunya berupa desa. Bahkan masih banyak masyarakat yang menyebut Tunggul Wulung ini sebagai wilayah pedesaan.

(Wawancara dilakukan tanggal 10 Januari 2012 pkl. 10.30 WIB)

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Tunggul Wulung masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, yaitu : dari masyarakat yang belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, hingga tamat SMP / sederajat berjumlah 3.507 orang. Sedangkan untuk yang memiliki tingkat pendidikan tamat SMA / sederajat, tamat akademi, hingga tamat Perguruan Tinggi berjumlah 2.847 orang. Meskipun antara tingkat pendidikan hanya selisih 660 orang, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. *(data pada tabel 3, hal 66)*

Selain berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentu berpengaruh juga pada pola

pikir masyarakat terhadap hal-hal baru seperti pembangunan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi suatu kendala dalam pembangunan kelurahan.

(2) Perkembangan penduduk

Perkembangan penduduk yang dimaksud disini adalah perkembangan penduduk yang begitu cepat dalam suatu wilayah. Semakin meningkatnya perkembangan penduduk menyebabkan semakin banyaknya pendatang di wilayah Kelurahan Tunggul Wulung. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa meningkatnya jumlah penduduk kota dapat menjadi indikator dalam pembangunan. Hal ini dapat menjadi penghambat pembangunan karena dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan dapat menimbulkan urbanisasi. Bapak Kolik menjelaskan bahwa :

Masyarakat Tunggul Wulung sekarang bertambah banyak dengan adanya pemukiman-pemukiman baru, sehingga banyak pendatang yang kemudian tinggal di wilayah Tunggul Wulung. Hal ini semakin memicu terjadinya urbanisasi yang akhirnya akan menjadi kendala dalam meningkatkan pembangunan. Selain kendala dalam hal urbanisasi, tingkat pengangguran yang ada di Tunggul Wulung akan menjadi semakin tinggi dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan.
(Wawancara dilakukan tanggal 11 Januari 2012 pk. 11.00 WIB)

Melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan masyarakat dapat juga menjadi kendala dalam pembangunan jika pada akhirnya tingkat pengangguran masyarakat akan semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data mata pencaharian penduduk yang menunjukkan bahwa 1.138 orang masyarakatnya telah bekerja dari total penduduk berjumlah 6.354 orang. Sedangkan sebanyak 3.637 orang termasuk ke

dalam kategori masyarakat yang belum bekerja. selisih yang dihasilkan adalah 2.717 orang yang berarti masuk ke dalam masyarakatnya yang masih belum bekerja. (*data pada tabel 4, hal 67*)

(3) Adanya kepentingan dari penggerak sosial

Kepentingan penggerak sosial dapat menjadi suatu kendala dalam pembangunan, ketika penggerak sosial memanfaatkan kedudukan yang dimilikinya untuk mengendalikan proses pembangunan. Bapak Rohis menjelaskan bahwa :

Di setiap wilayah pasti memiliki beberapa penggerak sosial. Dan setiap penggerak sosial pasti memiliki kepentingan pribadi. Begitu juga yang terjadi di Tunggul Wulung. Ada beberapa program pembangunan yang mendapatkan bantuan dari tokoh penggerak sosial, yang tentu saja memiliki kepentingan pribadi di balik bantuan yang diberikan. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang memandang bahwa kami merupakan anggota penggerak sosial tersebut, sehingga beberapa masyarakat berpandangan negatif terhadap kami yang berakibat tidak mendukung program pembangunan yang kami lakukan.

(*Wawancara dilakukan tanggal 11 Januari 2012 pkl. 13.00 WIB*)

Dari pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung akan berjalan lancar apabila pola pikir masyarakat tentang pembangunan di ubah, sehingga adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat akan lebih melancarkan proses pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung. Oleh karena itu faktor-faktor penghambat di atas harus lebih diperhatikan agar terwujud pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan terwujud pembangunan yang jauh dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan yang dapat mempengaruhi masyarakat.

C. Analisa Dan Interpretasi Data

1. Kinerja LPMK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan

a. Hasil Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Dicanangkan Sebelumnya

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak factor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur / komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik.

Dalam pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif yang sedang dikembangkan ini pada dasarnya yang menjadi ujung tombak dan sekaligus garda terdepan bagi berhasilnya pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif tiada lain adalah sejauhmana keterlibatan masyarakat termasuk pengurus RT, RW, kelurahan, maupun LPMK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang ada di lingkup kelurahan tersebut. (<http://dipisolo.tripod.com>)

Pembangunan dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana

(<http://andamifardela.wordpress.com>)

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa perencanaan pembangunan memiliki 4 (empat) tahapan. Dalam proses perencanaan pembangunan LPMK, perencanaan juga perlu melalui berbagai tahap sebelum ditentukan pembangunan apa saja yang akan dilakukan. Tahap pertama adalah penyusunan rencana yang dilakukan dengan adanya musyawarah di tingkat RT/RW, masyarakat memberikan usulan-usulan mereka kepada Ketua RW yang nantinya akan dibahas dalam musyawarah dengan LPMK. Setelah pelaksanaan musyawarah dengan LPMK, usulan-usulan

tersebut akan dibahas dalam musyawarah di tingkat kelurahan yang dikenal dengan Musrenbangkel. Dalam Musrenbangkel, musyawarah akan dihadiri oleh tokoh dari BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) yang tugasnya mengawasi kinerja LPMK, dari tokoh LPMK Kelurahan Tunggul Wulung, staf kelurahan, perwakilan masing-masing RW, tokoh karang taruna, maupun dari anggota-anggota LPMK.

Setelah dari Musrenbangkel, usulan pembangunan akan dibawa ke musyawarah tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan ini, tokoh-tokoh yang ditunjuk mengikuti Musrenbang kecamatan adalah perwakilan peserta RW, perwakilan unsur PKK, perwakilan unsur LPMK, perwakilan unsur BKM, dan perwakilan unsur kelurahan. Setelah di tentukan hasil Musrenbang kecamatan, program pembangunan tersebut akan dibawa ke Musyawarah Kota yang akan mendapatkan persetujuan mengenai program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di masing kelurahan. Setelah dari musyawarah tingkat Kota, LPMK sudah dapat menjalankan program pembangunan di kelurahannya masing-masing, baik secara fisik dan non fisik, sesuai keputusan musyawarah Kota. Pada tahap ini disebut dengan tahap penetapan rencana.

Setelah melewati beberapa tahap, kini tiba pada tahap pelaksanaan rencana yang akan dilakukan oleh LPMK sebagai lembaga dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum saja, tetapi juga pada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui program pembinaan dan pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kelurahan Tunggul Wulung telah berjalan sesuai dengan perencanaan dalam Musrenbangkel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung telah berjalan hampir 85% dari target yang seharusnya dilakukan. Sehingga pembangunan di kelurahan Tunggul Wulung tahun 2011 dapat dikatakan telah berjalan sesuai rencana.

b. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut The Liang Gie dalam kamus administrasi (1983:17) bahwa partisipasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti keikutsertaan. Melihat arti dasar dari partisipasi dapat dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi adalah setiap hal yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam bentuk apapun. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, baik partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat terwujud melalui beberapa jenis, yaitu : partisipasi pendapat, partisipasi materiil, partisipasi keahlian, dan partisipasi tenaga.

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Davis (1989:187) yang menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok sehingga memberanikan mereka untuk membantu pencapaian tujuan bersama atau kelompok dan membagi tanggung jawab diantara mereka.

Sesuai dengan pendapat-pendapat ahli mengenai partisipasi publik, dalam pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung, partisipasi masyarakat dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangkel maupun dalam pelaksanaan pembangunan melalui sumbangan materiil dan tenaga. Sejalan dengan itu Bapak Kolik dan Bapak Rohis berpendapat bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Tunggul Wulung terbagi dalam beberapa aspek, yaitu :

- 1) Partisipasi pendapat, masyarakat terlibat dalam pemberian usulan maupun saran pembangunan pada saat musyawarah RT/RW mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Tunggul Wulung, juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbangkel.
- 2) Partisipasi materiil, masyarakat juga terlibat dalam partisipasi materiil ketika masyarakat memberikan sumbangan berupa materiil (dana) untuk membantu pembangunan kelurahan.
- 3) Partisipasi tenaga, dalam beberapa pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung dibantu oleh beberapa tenaga dari masyarakatnya, contohnya adalah pavingisasi jalan, pembuatan pendopo seni, pembuatan gapura, dan lain-lain.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung cukup tinggi dalam pembangunan. Terlibatnya masyarakat tidak hanya dalam perencanaan pembangunan tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

c. Menumbuhkembangkan Masyarakat Melalui Pelatihan Ketrampilan

Salah satu pelaksanaan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan non fisik yang dapat berupa peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketrampilan maupun pembinaan. Menurut Aji dan Sirait (1984) pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan modal, akan tetapi dengan mempertimbangkan pula keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain menurut pendapat di atas, Tjokroamidjojo (1985 : 12) menambahkan bahwa pembangunan merupakan upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya ada dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan infrastruktur, sedangkan pembangunan non fisik dapat berupa pelatihan atau peningkatan skill. Mengingat hal tersebut, maka Kelurahan Tunggul Wulung turut memberikan pelatihan dan pembinaan ketrampilan sebagai wujud peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung, pelatihan dan pembinaan lebih mengedepankan peningkatan ekonomi para pedagang dan peningkatan pelayanan dari masyarakat untuk masyarakat seperti posyandu, paud,

dan lain-lain. Sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya terdiri dari kalangan ekonomi menengah kebawah, dukungan ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat Tunggul Wulung berprofesi sebagai pedagang kecil menengah yang beraneka ragam. Dari pedagang keliling jamu gendong, pedagang keripik tempe, maupun pedagang dari sentra ekonomi masyarakat lainnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kolik dan Bapak Rohis bahwa pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh LPMK tahun 2011 ini mengutamakan pelatihan dan pembinaan bagi pedagang serta ibu-ibu PKK guna meningkatkan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Bidang ekonomi
 - a) Peningkatan kualitas pedagang keliling (tahu, dawet)
 - b) Pembinaan pedagang keliling jamu gendong
 - c) Pemberdayaan usaha sentra ekonomi masyarakat
- 2) Unsur PKK
 - a) Pembinaan dasawisma
 - b) Pembinaan posyandu lansia
 - c) Pembinaan dan peningkatan kegiatan posyandu balita
 - d) Pembinaan dan peningkatan kegiatan pos paud

Dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada sejumlah masyarakat, diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih meningkatkan usaha ekonomi dan

pelayanannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh LPMK.

d. Tanggapan Masyarakat Atas Kinerja LPMK

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Selanjutnya mulyana mengemukakan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lisan. (Mulyana, 2000:168)

Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. faktor eksternal berupa lingkungan. kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi.

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang untuk terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. seperti dikatakan krech (dalam thoha, 2000:124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya. (<http://2frameit.blogspot.com>)

Berbicara mengenai persepsi atau tanggapan masyarakat mengenai kinerja LPMK Kelurahan Tunggul Wulung, tentu tidak jauh dari tanggapan positif dan negatif. Dari hasil wawancara dengan berbagai masyarakat, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu LPMK, tugas dan fungsinya. Ada juga masyarakat yang berpandangan negatif terhadap LPMK, yang menganggap LPMK sebagai pelaksana beberapa penggerak sosial.

Tanggapan-tanggapan masyarakat di atas, di sebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi LPMK dan pengetahuan mengenai pentingnya pembangunan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa sudah puas dengan kehidupan mereka sekarang tanpa pernah berfikir untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hal ini diperlukan adanya sosialisasi atau pemberian penjelasan mengenai pentingnya pembangunan dan bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi LPMK dalam pembangunan kelurahan agar tercipta masyarakat yang mampu berfikir jauh ke depan tentang pentingnya peningkatan pembangunan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja LPMK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menurut Gomes (1997), merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang

melakukan aktivitas. Dalam suatu organisasi perlu adanya suatu manajemen yang mengelola sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Mathis dan Jackson (2006) mengartikan manajemen sumber daya manusia sebagai rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya.

Selain itu, menurut Werther dan Davis yang dikutip oleh Edy Sutrisno menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (Werther dan Davis dalam Sutrisno, 2009:1)

Menurut Hadari Nawami yang dikutip oleh Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah yang dimaksudkan sebagai sumber daya manusia meliputi tiga pengertian yaitu

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan)
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/nonfinansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik

dalam mewujudkan eksistensinya. (Nawami dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2003:9)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau cirri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya yang terdiri atas aspek kualitas dan kuantitas.

Bicara tentang kuantitas (jumlah) berarti menunjukkan bagaimana karakteristik demografis tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan komposisi penduduk. Sedangkan untuk kualitas (mutu) menjelaskan bagaimana seorang manusia berhubungan dengan karakteristik sosial dan ekonomi agar terciptanya suatu keberhasilan dalam pembangunan. Tentunya sangat dibutuhkan sekali sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan baik secara fisik maupun mental.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam pembangunan yang selama ini sering kita abaikan. Sumber daya manusia atau penduduk menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi manusia

apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia.

(<http://ekaagustianingsih.blogspot.com>)

Seperti telah dijelaskan bahwa SDM merupakan faktor kunci dalam suatu pembangunan karena subyek dan obyek suatu pembangunan adalah SDM atau masyarakat, begitu juga halnya yang terjadi di Kelurahan Tunggul Wulung. Dukungan dan keikutsertaan masyarakat terlihat dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini dapat berupa sumbangan masyarakat melalui pikiran atau pendapat dalam perencanaan pembangunan, materiil, ataupun tenaga yang dapat membantu proses pembangunan kelurahan.

2) Keuangan atau Dana

Selain partisipasi masyarakat di segala bidang, faktor pendukung yang juga menjadi penentu terlaksananya pembangunan adalah dana, baik dari pemerintah maupun dari sumbangan masyarakat.

a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005:61), “Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi [pemerintah daerah](#). Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi [pemerintah daerah](#). Sebagai instrumen kebijakan, [anggaran daerah](#) menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas.

[Anggaran daerah](#) digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”.

Salah satu dana pembangunan yang berasal dari APBD adalah Dana Hibah yang diberikan secara langsung oleh Pemerintah Kota kepada LPMK sebagai bantuan untuk meningkatkan pembangunan di setiap kelurahan di Kota Malang. Besar Dana Hibah dari Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp 250juta untuk masing-masing kelurahan.

b) Swadaya masyarakat

Definisi swadaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan (tenaga) sendiri. Dana swadaya masyarakat adalah uang atau barang/jasa yang diberikan secara sukarela dan dapat dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat dan secara langsung digunakan untuk suatu keperluan tertentu, dalam hal ini adalah pembangunan kelurahan.

Dalam pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung, bantuan yang diberikan masyarakat berupa dana atau materiil, tenaga, maupun pemikiran mengenai pembangunan. Dalam memberikan sumbangan atau bantuan, masyarakat ada yang memberikan secara kelompok, individu, maupun hasil dari pengumpulan beberapa masyarakat.

Kedua hal di atas menjadi faktor pendukung dan faktor penentu berjalannya proses pembangunan di kelurahan Tunggul Wulung. Jika tidak ada salah satu faktor di atas, pembangunan tentu tidak dapat berjalan baik, yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan wilayah Tunggul Wulung itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

1) Tingkat pendidikan yang rendah

Sumber daya manusia yang handal merupakan asset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah. Di Negara sedang berkembang pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan kualitas yang rendah. Dengan kondisi seperti ini jelas sangat menghambat proses pembangunan. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Berapapun sempurnanya aspek teknologi dan keuangan, tanpa didukung oleh manusianya, maka tujuan organisasi akan sulit dicapai. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

sumber daya manusia tersebut. Selain berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh juga pada semakin meningkatnya pengangguran di suatu wilayah. Atas dasar itulah maka faktor sumber daya manusia perlu dibina dan dikembangkan. (Kadir dkk, 1982)

Pada Kelurahan Tunggul Wulung, rendahnya tingkat pendidikan dapat terlihat pada tabel 3 mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di kelurahan Tunggul Wulung terbanyak ada pada tingkat pendidikan tidak tamat SD sampai tamat SMA / sederajat yang berjumlah 4.796 orang. Sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan tamat akademi sampai y tamat perguruan tinggi hanya berjumlah 876 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Tunggul Wulung masih rendah yang dapat berakibat pada pembangunan.

2) Perkembangan penduduk

Perkembangan penduduk yang dimaksud adalah perkembangan penduduk yang sangat cepat dalam suatu wilayah. Perkembangan penduduk disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah tingginya tingkat urbanisasi masyarakat yang akhirnya mengakibatkan semakin padatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini dapat menjadi kendala dalam suatu pembangunan jika jumlah penduduk yang produktif sangat terbatas, tingkat pengangguran semakin meningkat dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan adanya tingkat pendudukan yang semakin meningkat, akan berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat. (Safira, 2005)

Seperti yang terjadi di Kelurahan Tunggul Wulung, bahwa dengan adanya perumahan-perumahan baru yang notabene menambah peningkatan penduduk, lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung masyarakat sehingga masih banyak terjadi pengangguran di sana. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 mengenai jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian mereka. Data yang didapat bahwa 2.847 orang merupakan masyarakat yang belum bekerja.

3) Adanya kepentingan dari penggerak sosial

Organisasi sosial yang telah mengenal system lapisan dapat dipastikan akan ada sekelompok individu yang memanfaatkan kedudukan dalam proses perubahan tersebut. Contoh, dalam masyarakat feodal dan juga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi. Pada masyarakat yang mengalami transisi, tentunya ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi. Karena selalu mengidentifikasi diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya, sulit bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan. (<http://prasetyowidi.wordpress.com>)

Sejalan dengan pemikiran di atas, ada beberapa masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung yang beranggapan negatif terhadap pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan dari pihak penggerak sosial dalam memberikan bantuan dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa LPMK sebagai lembaga pembangunan digerakkan oleh penggerak sosial yang memiliki kepentingan sendiri. Anggapan inilah yang akhirnya dapat menjadi kendala dalam pemnangunan di Kelurahan

Tunggul Wulung, karena masih ada masyarakat yang tidak memberikan dukungan terhadap pembangunan tersebut.

Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja LPMK di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pikir masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung masih sangat rentan dengan intervensi dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan masyarakat Tunggul Wulung yang masih memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini diharapkan pemerintah kelurahan dapat lebih memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan dalam kelurahan, sehingga masyarakat dapat mulai berfikir ke depan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung dalam melaksanakan pembangunan selama tahun 2011 ini telah berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya (tugas pokok dan fungsi LPMK dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001). Kinerja yang maksimal dapat dilihat dari peningkatan pembangunan yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung, peningkatan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non fisik melalui pelatihan ketrampilan dan pembinaan yang presentasi tercapainya program pembangunan sebesar 81,25%.
2. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tunggul Wulung dikatakan maksimal, selain terlihat dari tercapainya pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan sekitar 81,25% juga dapat terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat RT/RW sampai kelurahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan melalui sumbangan tenaga dan sumbangan materiil.

3. Peningkatan kinerja suatu organisasi atau lembaga tidak hanya didukung dengan faktor pendukung dari luar maupun dari dalam, tetapi juga memerlukan suatu upaya atau langkah yang baik agar kinerja semakin lebih ditingkatkan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) juga melakukan hal tersebut diantaranya dengan cara melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis Kelurahan Tunggul Wulung serta meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan. Peningkatan masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan ketrampilan dan pembinaan pada masyarakat yang memiliki usaha ekonomi kecil agar dapat lebih meningkatkan usahanya.
4. Selain dari beberapa penjelasan di atas, maksimalnya kinerja LPMK dapat terlihat dari hasil pengawasan dari masyarakat mengenai kinerja LPMK yang banyak memberikan tanggapan positif dan banyaknya masyarakat yang merasa diuntungkan atas kinerja LPMK dalam meningkatkan pembangunan Kelurahan Tunggul Wulung.
5. Faktor-faktor pendukung Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diantaranya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan mendukung proses pembangunan, baik melalui keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Selain SDM yang mendukung, adanya dana atau keuangan dari berbagai pihak juga menjadi faktor pendukung kinerja LPMK dalam pembangunan, sumber dana LPMK berasal dari dana hibah

Pemerintah Daerah Kota Malang dan berasal dari dana swadaya atau sumbangan masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung. Sementara faktor penghambat Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdapat pada tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yang mengakibatkan kesadaran masyarakat akan pembangunan pun rendah sehingga hal ini dapat menjadi kendala bagi kinerja LPMK dalam memberikan pembangunan yang sesuai bagi masyarakat.

B. Saran

Saran-saran yang dikemukakan disini oleh penulis diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program-program pembangunan LPMK hendaknya lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pembangunannya agar semua program pembangunan yang telah dicanangkan oleh LPMK dapat semua terwujud dan tercapai.
2. Kinerja LPMK dalam meningkatkan pembangunan non fisik melalui pelatihan ketrampilan dan pembinaan kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi, tidak hanya bagi ibu rumah tangga dan pedagang kecil saja, tetapi juga pada masyarakat muda, mengingat sebagian besar masyarakat muda di Tunggul Wulung belum memiliki pekerjaan tetap

dan sebagian menggantungkan hidupnya sebagai pedagang usaha kecil dan ibu rumah tangga.

3. Peningkatkan pembangunan lapangan kerja bagi masyarakat sangat diperlukan, tidak hanya lapangan kerja bagi para pedagang saja tetapi juga lapangan kerja bagi para masyarakat muda. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Tunggul Wulung yang belum bekerja adalah masyarakat muda.
4. Selain peningkatan pembangunan lapangan kerja, peningkatan dalam pemberian sarana dan prasarana pada usaha-usaha masyarakat juga hendaknya lebih di prioritaskan, terutama pemberian sarana dan prasarana bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani agar mereka lebih dimudahkan dalam mengolah lahan pertanian mereka, mengingat sebagian besar wilayah Tunggul Wulung masih banyak terdapat lahan yang berupa persawahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman B dan Sirait, Martin. 1982. *PDE Perencanaan dan Evaluasi : Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Donovan, F. & A.C. Jackson. 1991. *Managing Human Service Organization*. New York, N.Y: Prentice Hall
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Faustino Cardos, Gomes. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Gibson, James L. 1990. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses* (Jilid II). Jakarta: Erlangga
- Interplan (International Group for Studies in National Planning). 1969. *Appraising Administrative Capability for Development*. New York: United Station
- Kadiman, Irawan. 2001. *Konsep dan Indikator Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- _____. 2001. *Teori dan Indikator Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Keban, Yaremis T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Adminsitasi Publik: Konse, Teori, dan Isu*. Jakarta: Gava Media
- Kumorotomo, Wahyudi. 1996. *Meningkatkan Kinerja BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi dan Kebijakan Deregulasi*. Yogyakarta: JKAP No.1
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama

- Mathis dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Murphy, Kevin R & Jeanette N. Cleveland. 1995. *Understanding Performance Appraisal: Social, Organizational and Goal-Based Perspective*. California: Sage Publication
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Admoinistrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- _____. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- North, D. C. 1990. *Institution, Institutional Change and Economic's Performance*. Cambridge University Press
- Ostrom, E. 1990. *Governing of The Common. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press
- Prawirosentono, Suryadi. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE
- Schmid, A. 1972. *The Economic Theory of Social Institutions*. American Journal of Agricultural Economics. 54:893-901
- Schotter, A. 1981. *The Economic Theory of Social Institutions*. Cambridge University Press
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soemarwoto, Otto. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Timpe, A. Dale. 1988. *The Art and Science of Business Management Performance*. New York: KEND Publishimh. Inc

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung

Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedai Publishing

Makalah

2003. *Pelatihan Keterampilan Manajerial SPMK*. WHO: SEA-NURS-429, IN O OSD 001/1.2.

Astutik, Zuli. 2007. *Evaluasi Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK PHASE II di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. FIA: Administrasi Publik, Konsentrasi Administrasi Pembangunan

Ayu, Diah. 2005. *Opini Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan*. FIA: Administrasi Negara, Konsentrasi Administrasi Pembangunan

Hidayat, Aceng. 2007. *Pengantar Ekonomi Kelembagaan*. IPB: Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Kadir, dkk. 1982. *Pendidikan Di Negara Sedang Berkembang*. Surabaya: Usaha Nasional

Kartasasmita, Ginandjar. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Bahan Kuliah SP 605. Jakarta: Program Pasca Sarjana ITB

Keban, Yaremis T. 1995. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta

Safira. 2005. *Hambatan Pembangunan*. Jakarta: Univ. Mercu Buana

Perundang-undangan

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2008 Tentang Uraian Tupoksi dan Tata Kerja Kelurahan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Website

<http://butonutara.blogspot.com> diakses tanggal 11 Oktober 2011

<http://dokumens.multiply.com/journal> diakses tanggal 10 Oktober 2011

<http://lampungbarat.go.id> diakses tanggal 13 juni 2012

<http://masbied.com> diakses tanggal 15 Oktober 2011

<http://profsyamsiah.wordpress.com> diakses tanggal 11 Oktober 2011

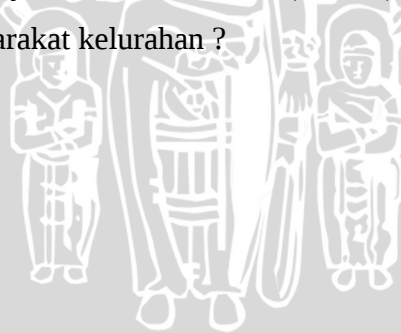
<http://scribd.com> diakses tanggal 11 oktober 2011

<http://uin-suska.ac.id> diakses tanggal 15 Oktober 2011

PEDOMAN WAWANCARA

(INTERVIEW GUIDE)

1. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh LPMK di Kelurahan Tunggul Wulung sudah sesuai dengan perencanaan ?
2. Bagaimanakah perkembangan dan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tunggul Wulung ?
3. Apa Sajakah pelatihan ketrampilan yang telah dilakukan oleh LPMK di Kelurahan Tunggul Wulung ?
4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai pembangunan yang telah dilakukan oleh LPMK di Kelurahan Tunggul Wulung ?
5. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan ?
6. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan ?



CURRICULUM VITAE**A. Data Mahasiswa**

1. Nama : Balqis Demes Piscesa
2. NIM : 0810310185
3. Tempat Tanggal Lahir : Malang, 8 Maret 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : JL. Sarangan Atas No 8f Malang
7. HP : 085749553212

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Lowokwaru VII Malang : 1996 - 2002
2. SMP NEGERI 18 Malang : 2002 - 2005
3. SMK NEGERI 3 Malang : 2005 - 2008
4. FIA Universitas Brawijaya Malang : 2008 - 2012